

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI
INDONESIA TAHUN 2013 - 2021**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Haryoso
NIM : 18313336
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

YOGYAKARTA

2023

T.A 2022/2023

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA SELURUH
PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 - 2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
untuk memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nama : Haryoso
NIM : 18313336
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulisdengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan seperti dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 7Februari 2023

Penulis,



Haryoso

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

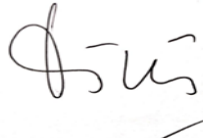
Analisis Ketimpangan Pendapatan Provinsi Pada Seluruh Provinsi di Indonesia
Tahun 2013-2021

Nama : Haryoso
NIM : 18313336
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, - 2023

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Dra. Diana Wijayanti, M.S.i

الجامعة الإسلامية
الابستد الاندو

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISI KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 - 2021

Disusun oleh : HARYOSO

Nomor Mahasiswa : 18313336

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 14 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Diana Wijayanti, M.Si.

Penguji : Suharto, SE., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



PERSEMBAHAN

Puji serta syukur kehadiran ALLAH SWT atas nikmat dan rahmatnya yang senantiasa memberi kelancaran, kelancaran, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan Provinsi Pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2021”. Skripsi ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub, puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan nikmat serta karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan umat muslim baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh ilmu. Skripsi ini disusun dengan judul “ Analisis Ketimpangan Pendapatan Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia” yang dapat diselesaikan dengan lancar dan minim kendala. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ditemui berbagai kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan analisis ini. Selama proses menyusun skripsi, penulis memperoleh cukup banyak bimbingan, bantuan, dukungan, arahan, dan juga doa dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua penulis bapak Haryoko dan ibu Iin Intra Dewi yang senantiasa memberikan restu kepada penulis. Terimakasih atas dukungan, pengertian dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
2. Dosen pembimbing, Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.S.i yang telah memberikan arahan, ilmu, kesempatan, dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr.,SE.,M.A, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof.Jaka Sriyana.,S.E.,M.Si., Ph.D..
5. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Teman-teman penulis yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan di almamater ini.

Penulis menerima berbagai macam kritik serta saran demi perbaikan skripsi ini kedepannya. Penulis harap skripsi ini dapat dijadikan referensi serta memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
1.2 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Ketimpangan Pendapat	17
2.2.7 Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen	22
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan sumber data	26
3.2 Definisi Operasional Variabel	26
3.3 Metode Analisis	28
3.4 Uji Statistik	31
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	34
4.1 Deskripsi Data Penelitian	34
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	35
4.3 Hasil Estimasi untuk Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect model	36

4.4 Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Indeks Gini per Provinsi di seluruh Indonesia (persen)	2
Tabel 1.2 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Provinsi di Indonesia (persen) Tahun 2013-2021	3
Tabel 1.3 Upah Minimum Provinsi di seluruh Indonesia Tahun 2013-2021	5
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2021	7
Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2013-2021	8
Tabel 2.1 Kajian Pustaka	15
Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian	34
Tabel 4.2 Hasil estimasi model <i>Common Effect</i>	36
Tabel 4.3 Hasil estimasi model <i>Fixed Effect</i>	36
Tabel 4.4 estimasi model <i>Random Effect</i>	37
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Chow</i>	38
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Hausman</i>	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Data Penelitian	66
Lampiran B : Common Effect Model	74
Lampiran C : Fixed Effect Model	75
Lampiran D : Random Effect Model	77
Lampiran E : Chow Test	79
Lampiran F : Hausman Test	81
Lampiran G : Lagrange Multiplier	84



ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan serius dan rumit. Perbedaan pendapatan menjadi alasan terjadinya masalah ketimpangan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti kondisi sumber daya manusia yang berpengalaman akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah menganalisis pengaruh antara laju pertumbuhan PDRB, UMP, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan pada seluruh provinsi di Indonesia. Analisis ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari BPS mengenai laju pertumbuhan PDRB, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia. Metode analisis dengan regresi data panel, yakni kombinasi dari data *cross section* dengan *time series* dan selanjutnya diolah dengan *eviews 9*. Pemilihan model menggunakan metode *Random Effect Model*. Diperoleh hasil dari penelitian ini di mana secara simultan variabel PDRB, UMP, JP, dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai 2021

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, PDRB, UMP, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang umumnya dialami di setiap negara, terlebih lagi negara yang masih berkembang diantaranya adalah masalah ketimpangan pendapatan, di mana hal ini dialami oleh masyarakat yang menuntun ke permasalahan kemiskinan. Faktor penyebab ketimpangan pendapatan di suatu wilayah disebabkan oleh kurangnya SDA dan juga SDM serta letak geografis tiap wilayah (Brodjonegoro, 2018).

Ketimpangan ekonomi mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mampu memberikan dorongan untuk wilayah yang kurang maju sehingga mampu bersaing untuk meningkatkan pertumbuhan serta kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi juga memberikan dampak negatif diantaranya tidak efisiensinya ekonomi, dan dapat menurunkan stabilitas sosial (Todaro, 2011).

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi khususnya ketimpangan pendapatan dibutuhkan pembangunan nasional, dengan adanya pembangunan nasional akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif. Kehadiran pertumbuhan ekonomi permasalahan ketimpangan pendapatan dengan seiring waktu akan melandai. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dikatakan dengan fenomena meningkatnya jumlah pendapatan dari tahun ke tahun, di mana proses pembangunan ekonomi yang berlangsung tidak merata dan dapat memicu terjadinya kesenjangan pendapatan pada tiap-tiap daerah (Amri, 2017).

Tingkat kemajuan ekonomi pada setiap daerah memiliki tingkatan yang berbeda-beda, hal tersebut mengakibatkan efek yang buruk pada daerah yang mempunyai modal relatif rendah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak baik, dan infrastruktur yang kurang memadai sehingga meningkatkan ketimpangan daerah (Todaro, 2011).

Berikut adalah data yang menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi di seluruh wilayah indonesia :

Tabel 1.1 Data Indeks Gini per Provinsi di seluruh Indonesia (persen)
pada tahun 2015-2021

Provinsi	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	0.341	0.325	0.334	0.333	0.329	0.325	0.3	0.37	0.324
SUMATERA UTARA	0.354	0.321	0.336	0.319	0.315	0.318	0.3	0.338	0.314
SUMATERA BARAT	0.363	0.334	0.342	0.331	0.318	0.321	0.31	0.323	0.306
RIAU	0.374	0.353	0.364	0.347	0.325	0.327	0.37	0.363	0.326
JAMBI	0.348	0.329	0.361	0.349	0.335	0.334	0.35	0.351	0.321
SUMATERA SELATAN	0.383	0.399	0.36	0.348	0.361	0.358	0.35	0.358	0.341
BENGKULU	0.386	0.356	0.376	0.364	0.334	0.346	0.35	0.345	0.323
LAMPUNG	0.356	0.347	0.376	0.364	0.334	0.346	0.35	0.345	0.323
KEP. BANGKA BELITUNG	0.313	0.303	0.283	0.275	0.282	0.281	0.28	0.276	0.256
KEP. RIAU	0.362	0.402	0.364	0.354	0.334	0.33	0.34	0.337	0.343
DKI JAKARTA	0.433	0.431	0.431	0.411	0.413	0.394	0.39	0.399	0.409
JAWA BARAT	0.411	0.413	0.415	0.422	0.403	0.407	0.41	0.412	0.412
JAWA TENGAH	0.387	0.376	0.328	0.366	0.365	0.378	0.38	0.385	0.372
DI YOGYAKARTA	0.439	0.419	0.433	0.42	0.432	0.441	0.42	0.436	0.441
JAWA TIMUR	0.364	0.369	0.415	0.402	0.396	0.379	0.38	0.377	0.374
BANTEN	0.399	0.395	0.401	0.394	0.382	0.385	0.36	0.36	0.365
BALI	0.403	0.415	0.377	0.366	0.384	0.377	0.37	0.372	0.378
NUSA TENGGARA BARAT	0.364	0.377	0.368	0.359	0.371	0.372	0.41	0.403	0.381
NUSA TENGGARA TIMUR	0.352	0.355	0.339	0.336	0.359	0.351	0.34	0.334	0.346
KALIMANTAN BARAT	0.396	0.391	0.334	0.341	0.327	0.339	0.34	0.335	0.313
KALIMANTAN TENGAH	0.350	0.350	0.326	0.33	0.343	0.342	0.37	0.361	0.323
KALIMANTAN SELATAN	0.359	0.359	0.353	0.332	0.347	0.344	0.35	0.355	0.33
KALIMANTAN TIMUR	0.371	0.348	0.316	0.315	0.33	0.342	0.34	0.333	0.334
KALIMANTAN UTARA	0.413	0.34	0.294	0.3	0.308	0.303	0.29	0.289	0.292
SULAWESI UTARA	0.422	0.424	0.368	0.386	0.396	0.394	0.37	0.371	0.365
SULAWESI TENGAH	0.407	0.372	0.374	0.362	0.355	0.346	0.34	0.334	0.316
SULAWESI SELATAN	0.429	0.425	0.424	0.426	0.407	0.397	0.39	0.384	0.382
SULAWESI TENGGARA	0.426	0.409	0.399	0.402	0.394	0.409	0.41	0.404	0.39
GORONTALO	0.437	0.412	0.42	0.419	0.43	0.403	0.39	0.393	0.408
SULAWESI BARAT	0.349	0.352	0.363	0.364	0.354	0.37	0.45	0.436	0.356
MALUKU	0.370	0.351	0.34	0.348	0.343	0.343	0.4	0.295	0.314
MALUKU UTARA	0.318	0.325	0.28	0.286	0.317	0.328	0.31	0.297	0.32
PAPUA BARAT	0.431	0.439	0.44	0.373	0.39	0.394	0.33	0.32	0.38
PAPUA	0.442	0.408	0.421	0.39	0.397	0.384	0.3	0.296	0.397

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel menunjukkan Provinsi Papua memiliki Indeks Gini tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Tahun 2013 Indeks Gini Provinsi D.I.Yogyakarta adalah 0.439 menjadi yang tertinggi, sedangkan Indeks Gini di Kepulauan Bangka Belitung menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi yang lain dengan angka sebesar 0.313. Menurut pada tabel Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tingkat ketimpangan yang cukup tinggi diantara Provinsi yang lainnya dengan angka rata-rata senilai 0,428333 sedangkan daerah yang memiliki tingkat ketimpangan yang rendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan angka rata-rata 0,28. Dari hal tersebut dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara geografis, pulau Jawa menjadi penyumbang pembangunan terbesar. Aktivitas ekonomi di pulau Jawa menghasilkan PDB hampir setengah dari PDB Nasional. Setelah adanya pembagian pemerintahan di berbagai daerah atau otonomi daerah, begitupun ketimpangan antar daerah melaju begitu pesat. Sumbangsih PDRB per kapita hanya berfokus untuk daerah yang mempunyai pengaruh ekonomi pada masyarakat tinggi, dengan begitu laju jumlah pemakaian SDA yang besar dan kepadatan penduduk yang melaju begitu pesat. Akibat dari nilai ekonomi per daerah yang berbeda beda ini tingkat PDRB per kapita menjadi timpang dan pembangunan menjadi tidak merata.

Berikut ini lampiran tabel laju pertumbuhan PDRB pada seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Pada sembilan tahun terakhir sekitar 2013 sampai dengan 2021, pertumbuhan PDRB antar provinsi cenderung meningkat, tetapi ada penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 sampai pada angka yang negatif. Penurunan pertumbuhan PDRB pada tahun 2020 ini diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang mulai menyebar di berbagai daerah di Indonesia yang pada akhirnya ditetapkan sebagai pandemi nasional. Penurunan nilai pertumbuhan PDRB diakibatkan oleh lesunya aktivitas perekonomian yang ada pada tahun 2020 yang mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga memicu rendahnya pendapatan yang didapatkan oleh daerah.

Tabel 1.2 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
seluruh Provinsi di Indonesia (persen) Tahun 2013-2021

Provinsi	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	2.61	1.55	-0.73	3.29	4.18	4.61	4.14	-0.37	2.79
SUMATERA UTARA	6.07	5.23	5.10	5.18	5.12	5.18	5.22	-1.07	2.61
SUMATERA BARAT	6.08	5.88	5.53	5.27	5.30	5.14	5.01	-1.62	3.29
RIAU	2.48	2.71	0.22	2.18	2.66	2.35	2.81	-1.13	3.36
JAMBI	6.84	7.36	4.21	4.37	4.60	4.69	4.35	-0.44	3.66
SUMATERA SELATAN	5.31	4.79	4.42	5.04	5.51	6.01	5.69	-0.11	3.58
BENGKULU	6.07	5.48	5.13	5.28	4.98	4.97	4.94	-0.02	3.24
LAMPUNG	5.77	5.08	5.13	5.14	5.16	5.23	5.26	-1.67	2.79
KEP. BANGKA BELITUNG	5.20	4.67	4.08	4.10	4.47	4.45	3.32	-2.30	5.05
KEP. RIAU	7.21	6.60	6.02	4.98	1.98	4.47	4.83	-3.80	3.43
DKI JAKARTA	6.07	5.91	5.91	5.87	6.20	6.11	5.82	-2.39	3.56
JAWA BARAT	6.33	5.09	5.05	5.66	5.33	5.65	5.02	-2.52	3.74
JAWA TENGAH	5.11	5.27	5.47	5.25	5.26	5.30	5.36	-2.65	3.32
DI YOGYAKARTA	5.47	5.17	4.95	5.05	5.26	6.20	6.59	-2.68	5.53
JAWA TIMUR	6.08	5.86	5.44	5.57	5.46	5.47	5.53	-2.33	3.57
BANTEN	6.67	5.51	5.45	5.28	5.75	5.77	5.26	-3.39	4.44
BALI	6.69	6.73	6.03	6.33	5.56	6.31	5.60	-9.33	-2.47
NUSA TENGGARA BARAT	5.16	5.17	21.76	5.81	0.09	-4.50	3.90	-0.62	2.30
NUSA TENGGARA TIMUR	5.41	5.05	4.92	5.12	5.11	5.11	5.25	-0.84	2.51
KALIMANTAN BARAT	6.05	5.03	4.88	5.20	5.17	5.07	5.09	-1.82	4.78
KALIMANTAN TENGAH	7.37	6.21	7.01	6.35	6.73	5.61	6.12	-1.41	3.40
KALIMANTAN SELATAN	5.33	4.84	3.82	4.40	5.28	5.08	4.09	-1.82	3.48
KALIMANTAN TIMUR	2.76	1.71	-1.20	-0.38	3.13	2.64	4.70	-2.87	2.48
KALIMANTAN UTARA	4.43	8.18	3.40	3.55	6.80	5.36	6.89	-1.09	3.98
SULAWESI UTARA	6.38	6.31	6.12	6.16	6.31	6.00	5.65	-0.99	4.16
SULAWESI TENGAH	9.59	5.07	15.50	9.94	7.10	20.60	8.83	4.86	11.70
SULAWESI SELATAN	7.62	7.54	7.19	7.42	7.21	7.04	6.91	-0.71	4.65
SULAWESI TENGGARA	7.50	6.26	6.88	6.51	6.76	6.40	6.50	-0.65	4.10
GORONTALO	7.67	7.27	6.22	6.52	6.73	6.49	6.40	-0.02	2.41
SULAWESI BARAT	6.93	8.86	7.31	6.01	6.39	6.26	5.56	-2.40	2.56
MALUKU	5.24	6.64	5.48	5.73	5.82	5.91	5.41	-0.92	3.04
MALUKU UTARA	6.36	5.49	6.10	5.77	7.67	7.86	6.25	5.35	16.40
PAPUA BARAT	7.36	5.38	4.15	4.52	4.02	6.25	2.66	-0.76	-0.51
PAPUA	8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	7.32	-15.74	2.39	15.11

Sumber: Badan Pusat Statistik

PDRB adalah keseluruhan dari sekian banyaknya produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh wilayah tertentu dalam periode yang telah ditentukan. Hal ini bisa disimpulkan, jika nilai dari PDRB meningkat maka jumlah produksi dan jasa pada wilayah tersebut akan memberikan efek terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan, terutama adalah masalah ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pada tabel 1.2 peningkatan nilai pertumbuhan PDRB pada setiap provinsi yang berada di Indonesia mengarah kepada angka yang positif kecuali pada tahun 2020 yang dimana negara Indonesia sedang berada pada situasi pandemi nasional. Hal ini bisa diartikan bahwa sebelum adanya pandemi di Indonesia laju pertumbuhan PDRB di seluruh provinsi di Indonesia berjalan dengan baik dan mengarah kepada perekonomian yang positif. Meski tidak selalu mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB provinsi di seluruh Indonesia memberikan sinyal yang baik dan membawa perekonomian ke tingkat yang lebih baik. Selain adanya peningkatan laju pertumbuhan PDRB, upah minimum regional di tiap provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan, meski angka menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan namun pada tiap tahun provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Terlihat pada tabel dibawah, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 upah minimum regional di tiap provinsi mengalami kenaikan jumlah.

Tabel 1.3 Upah Minimum Provinsi di seluruh Indonesia Tahun 2013-2021

Provinsi	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	1550000.00	1750000.00	1900000.00	2118500.00	2500000.00	2700000.00	2916810.00	3165031.00	3165030.00
SUMATERA UTARA	1375000.00	1505850.00	1625000.00	1811875.00	1961354.00	2132189.00	2303403.00	2499423.00	2499422.00
SUMATERA BARAT	1350000.00	1490000.00	1615000.00	1800725.00	1949284.00	2119067.00	2289220.00	2484041.00	2484041.00
RIAU	1400000.00	1700000.00	1878000.00	2095000.00	2534673.00	2464154.00	2662026.00	2888564.00	2888563.00
JAMBI	1300000.00	1502300.00	1710000.00	1906650.00	2358454.00	2243719.00	2423889.00	2630162.00	2630161.00
SUMATERA SELATAN	1630000.00	1825000.00	1974346.00	2206000.00	2388000.00	2595995.00	2804453.00	3043111.00	3043111.00
BENGKULU	1200000.00	1350000.00	1500000.00	1605000.00	1730000.00	1888741.00	2040407.00	2213604.00	2213604.00
LAMPUNG	1150000.00	1399037.00	1581000.00	1763000.00	1908447.00	2074673.00	2241270.00	2432002.00	2431324.00
KEP. BANGKA BELITUNG	1265000.00	1640000.00	2100000.00	2341500.00	2534673.00	2755444.00	2976706.00	3230024.00	3230022.00
KEP. RIAU	1365087.00	1665000.00	1954000.00	2178710.00	2358454.00	2563875.00	2769754.00	3005460.00	3005383.00
DKI JAKARTA	2200000.00	2441000.00	2700000.00	3100000.00	3355750.00	3648036.00	3940973.00	4276350.00	4416186.00
JAWA BARAT	850000.00	1000000.00	1000000.00	2250000.00	1420624.00	1544361.00	1668373.00	1810351.00	1810351.00
JAWA TENGAH	830000.00	910000.00	910000.00	190900.00	1367000.00	1486065.00	1605396.00	1742015.00	1798979.00
DI YOGYAKARTA	947114.00	988500.00	988500.00	145200.00	1337645.00	1454154.00	1570923.00	1704608.00	1765000.00
JAWA TIMUR	866250.00	1000000.00	1000000.00	3045000.00	1388000.00	1508895.00	1630059.00	1768777.00	1868777.00
BANTEN	1170000.00	1325000.00	1600000.00	1784000.00	1931180.00	2099385.00	2267990.00	2460997.00	2446096.00
BALI	1181000.00	1542600.00	1621172.00	1807600.00	1956727.00	2127157.00	2297969.00	2494000.00	2493523.00
NUSA TENGGARA BARAT	1100000.00	1210000.00	1330000.00	1482950.00	1631245.00	1825000.00	2012610.00	2183883.00	2183883.00
NUSA TENGGARA TIMUR	1010000.00	1150000.00	1250000.00	1425000.00	1650000.00	1660000.00	1795000.00	1950000.00	1945902.00
KALIMANTAN BARAT	1060000.00	1380000.00	1560000.00	1739400.00	1631245.00	2046900.00	2211500.00	2399699.00	2399698.00
KALIMANTAN TENGAH	1553127.00	1723970.00	1896367.00	2057558.00	1650000.00	2421305.00	2663435.00	2903145.00	2903144.00
KALIMANTAN SELATAN	1337500.00	1620000.00	1870000.00	2085050.00	1882900.00	2454671.00	2651782.00	2877449.00	2877447.00
KALIMANTAN TIMUR	1752073.00	1886315.00	2026126.00	2161253.00	2339556.00	2543332.00	2747561.00	2981379.00	2981378.00
KALIMANTAN UTARA	1225000.00	2026126.00	2026126.00	2175340.00	2358800.00	2559903.00	2765463.00	3000804.00	3000803.00
SULAWESI UTARA	1550000.00	1900000.00	2150000.00	2400000.00	2598000.00	2824286.00	3051076.00	3310723.00	3310723.00
SULAWESI TENGAH	995000.00	1250000.00	1500000.00	1670000.00	1807775.00	1965232.00	2123040.00	2303711.00	2303710.00
SULAWESI SELATAN	1440000.00	1800000.00	2000000.00	2250000.00	2500000.00	2647767.00	2860382.00	3103800.00	3165000.00
SULAWESI TENGGARA	1125207.00	1400000.00	1652000.00	1850000.00	2002625.00	2177052.00	2351870.00	2552015.00	2552014.00
GORONTALO	1175000.00	1325000.00	1600000.00	1875000.00	2030000.00	2206813.00	2384020.00	2788826.00	2586900.00
SULAWESI BARAT	1165000.00	1400000.00	1655000.00	1864000.00	2017780.00	2193530.00	2381000.00	2678863.00	2571328.00
MALUKU	1275000.00	1415000.00	1650000.00	1775000.00	1925000.00	2222220.00	2400664.00	2604961.00	2604960.00
MALUKU UTARA	1200622.00	1440746.00	1577617.00	1975000.00	1975000.00	2320803.00	2508091.00	2721530.00	2721530.00
PAPUA BARAT	1720000.00	1870000.00	2015000.00	2237000.00	2416855.00	2667000.00	2934500.00	3134600.00	3134600.00
PAPUA	1710000.00	2040000.00	2193000.00	2435000.00	2663646.00	3000000.00	3240900.00	3516700.00	3516700.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mengacu dari data tabel, UMP di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. DKI Jakarta memiliki UMP paling tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain, yaitu sebesar 4.416.186,548 rupiah. Sedangkan untuk UMP terendah ada pada provinsi D.I.Yogyakarta yaitu sebesar 1.765.000 rupiah. Dengan adanya perbedaan tingkat UMP di Indonesia, ditemukan upah minimum yang tidak merata di Indonesia. UMP yang meningkat diharap dapat menurunkan level ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi di Indonesia.

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu kegagalan untuk memenuhi standar kebutuhan pangan atau perbandingan untuk standar garis kemiskinan sendiri adalah apabila mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan (Mulyo, 2015). Definisi dari garis kemiskinan adalah nilai rupiah dari pengeluaran minimal yang dibutuhkan individu untuk dapat melakukan pemenuhan atas kehidupan pokok selama satu bulan, entah itu kebutuhan makanan ataupun non-makanan (Statistik, 2021). Kemiskinan ini dapat memicu ketimpangan pendapatan di antara kaya dan miskin, di mana akan semakin tidak rata dan cukup sulit dalam pengentasan kemiskinan serta mampu memicu terhambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Jumlah penduduk pada setiap provinsi yang ada di Indonesia sangat beragam. Jumlah penduduk untuk pembangunan ekonomi daerah menjadi suatu masalah dasar. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin tidak dapat dikendalikan yang memicu tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai (Saputra, 2011).

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2021

Provinsi	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	4811.2	4906.4	5018.7	5094.5	5169.4	5243.4	5316.3	5388.1	5333.7
SUMATERA UTARA	1359.3	1376.5	1391.4	1436.8	1438.4	5411.8	5479.5	5545.7	1496.2
SUMATERA BARAT	5066.5	5318.8	5200.9	5272.5	5342.4	5411.8	5479.5	5545.7	5580.2
RIAU	6033.3	6184.4	6356.7	6478.4	6598.7	6717.6	6835.1	6951.2	6493.6
JAMBI	3286.1	3344.4	3403.9	3445.9	3478.1	3527.1	3566.2	3604.2	3585.1
SUMATERA SELATAN	7828.7	7941.5	8062.7	8174.1	8283.8	8391.5	8497.2	8600.8	8550.9
BENGGKULU	1814.4	1844.7	1875.9	1900.7	1924.9	1948.6	1971.8	1994.3	2032.9

LAMPUNG	7932.1	8026.2	8123.8	8210.3	8295.3	8377.7	8457.6	8534.8	9081.8
KEP. BANGKA BELITUNG	1315.1	1343.8	1373.3	1393.1	1412.7	1432.1	1451.1	1469.8	1473.2
KEP. RIAU	1861.4	1917.2	1982.8	2045.3	2109.4	2174.8	2241.6	2309.5	2118.2
DKI JAKARTA	9969.9	1075.31	10179.3	10265.3	10438.3	10428.3	10504.1	10576.4	10609.7
JAWA BARAT	45340.8	46029.7	46805.2	47365.8	47922.8	48475.5	49023.2	49565.2	48782.4
JAWA TENGAH	33264.3	33522.7	33728.9	33946.4	34156.4	34358.5	34552.5	34738.2	36742.5
DI YOGYAKARTA	3594.9	3637.2	3669.2	3718.5	3768.2	3818.3	3868.6	3919.2	3712.9
JAWA TIMUR	3863.2	3861.2	3874.3	3941.4	39287.3	39521.9	39744.8	39955.9	40878.8
BANTEN	11452.5	11704.9	11967.6	12157.2	12345.8	12530.8	12714.3	12895.3	12061.5
BALI	4056.3	4104.9	4148.4	4202.4	4256.3	4309.2	4362.4	4414.4	4362.7
NUSA TENGGARA BARAT	4710.8	4773.8	4148.4	4202.4	4256.5	4309.2	4362.4	4414.4	4362.7
NUSA TENGGARA TIMUR	4954.1	5036.9	5126.1	5204.7	5282.8	5360.3	5437.2	5513.4	5387.7
KALIMANTAN BARAT	4641.4	4760.7	4795.5	4859.9	4923.1	4985.1	5045.7	5104.9	5470.8
KALIMANTAN TENGAH	2384.7	2439.6	2497.3	2536.3	2547.8	2612.6	2649.8	2686.3	2702.2
KALIMANTAN SELATAN	3854.5	3922.7	3990.7	4049.5	4106.8	4162.4	4216.3	4268.6	4122.6
KALIMANTAN TIMUR	3870.8	3385.1	3431.3	3479.6	3527.1	3573.8	3619.7	3664.7	3808.2
KALIMANTAN UTARA	3650.9	584.54	644.5	657.3	670.7	682.8	695.6	708.4	713.6
SULAWESI UTARA	2360.4	2386.6	2409.7	2432.2	2453.7	2474.4	2494.1	2512.9	2638.6
SULAWESI TENGAH	2785.5	2831.2	2878.5	2919.8	2961.1	3001.9	3042.1	3081.7	3021.9
SULAWESI SELATAN	8342.8	8432.1	8520.8	8598.6	8674.4	8748.1	8819.5	8888.8	9139.5
SULAWESI TENGGARA	2396.7	2448.8	2502.7	2543.1	2583.4	2623.6	2663.7	2703.5	2659.2
GORONTALO	1098.3	115.63	1133.6	1144.8	1155.6	1166.1	1176.4	1186.3	1181.6
SULAWESI BARAT	1234.3	158.09	1281.7	1301.4	1320.9	1340.1	1359.2	1378.1	1436.8
MALUKU	1628.4	1657.1	1691.3	1710.4	1730.2	1749.5	1768.5	1787.1	1862.6
MALUKU UTARA	1114.9	1138.8	1167.1	1184.5	1201.7	1218.8	1235.7	1252.3	1299.2
PAPUA BARAT	828.3	849.81	876.83	897.6	919.4	941.4	963.6	986.8	1299.2
PAPUA	3032.5	3091.5	3153.8	3202.4	3252.3	3300.2	3347.1	3393.1	4355.4

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mengacu data tabel 1.4 data Jumlah penduduk adalah suatu indikator besarnya penyebaran populasi di tiap-tiap provinsi. Jika jumlah penduduk mengalami peningkatan, jumlah tenaga kerja pun juga demikian dan pendapatan daerah juga akan meningkat. Harapan kesejahteraan daerah berbanding lurus pada jumlah penduduk, dapat diharapkan semakin tinggi jumlah penduduk maka kemampuan pembangunan kesejahteraan pada daerahnya pun diharapkan juga sama.

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2013-2021

Provinsi	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	68.30	68.81	69.45	70.54	70.57	71.19	71.9	71.92	72.58
SUMATERA UTARA	68.33	68.87	69.51	70.52	70.55	71.36	71.74	71.77	72.39
SUMATERA BARAT	68.63	69.36	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65
RIAU	69.91	70.33	70.84	71.20	71.77	72.43	73.2	72.71	72.94
JAMBI	67.76	68.24	68.86	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63
SUMATERA SELATAN	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24
BENGKULU	67.50	68.06	68.59	69.32	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64
LAMPUNG	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90
KEP. BANGKA BELITUNG	67.92	68.27	69.15	69.55	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69
KEP. RIAU	73.02	73.40	73.75	73.99	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79
DKI JAKARTA	78.08	78.39	78.99	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11
JAWA BARAT	68.25	68.80	69.50	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45
JAWA TENGAH	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16
DI YOGYAKARTA	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22
JAWA TIMUR	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14
BANTEN	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72
BALI	72.09	72.48	73.27	73.65	74.30	74.77	75.38	75.50	75.69
NUSA TENGGARA BARAT	63.76	64.31	65.19	65.81	66.58	67.30	68.14	68.25	68.65
NUSA TENGGARA TIMUR	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	64.39	65.23	65.19	65.28
KALIMANTAN BARAT	64.30	64.89	65.59	65.88	66.26	66.98	67.65	67.66	67.90
KALIMANTAN TENGAH	67.41	67.77	68.53	69.13	69.79	70.42	70.91	71.05	71.25
KALIMANTAN SELATAN	67.17	67.63	68.38	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91	71.28
KALIMANTAN TIMUR	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88
KALIMANTAN UTARA	67.99	68.64	68.76	69.20	69.84	70.56	71.15	70.63	71.19
SULAWESI UTARA	69.49	69.96	70.39	71.05	71.66	72.20	72.99	72.93	73.30
SULAWESI TENGAH	65.79	66.43	66.76	67.47	68.11	68.88	69.50	69.55	69.79
SULAWESI SELATAN	67.92	68.49	69.15	69.76	70.34	70.90	71.66	71.93	72.24
SULAWESI TENGGARA	67.55	68.07	68.75	68.31	69.86	70.61	71.20	71.45	71.66
GORONTALO	64.70	65.17	65.86	66.29	67.01	67.71	68.49	68.68	69.00
SULAWESI BARAT	61.53	62.24	62.96	63.60	64.30	65.10	65.72	66.11	69.00
MALUKU	66.09	66.73	67.05	67.60	68.19	68.87	69.45	69.49	69.71
MALUKU UTARA	64.78	65.18	65.91	66.63	67.22	67.76	68.71	68.49	68.76
PAPUA BARAT	60.92	61.25	61.72	62.22	62.96	63.72	64.74	65.05	65.26
PAPUA	56.22	56.45	57.23	58.04	59.24	60.06	60.86	60.48	60.66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tabel 1.5 IPM paling tinggi berada di pulau Jawa pada provinsi DKI Jakarta yaitu 80,77% sedangkan untuk yang terendah ada pada provinsi

papua yakni sebesar 56,22% dapat disimpulkan bahwa IPM di provinsi papua dapat dikategorikan rendah jika dibandingkan pada provinsi DKI Jakarta.

(Zainuddin, 2015) menuturkan bahwa rangkaian pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan bagi para penduduk, karena bagaimanapun kesejahteraan sudah menjadi hak bagi individu maupun kelompok agar aspek-aspek dasar mereka dapat terpenuhi dan dapat menjalani kehidupan dengan layak. Maka dari itu masalah ini adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk mengambil Langkah melalui berbagai kebijakan yang dicanangkan sehingga terwujud kesejahteraan yang merata dan juga adil di level tertentu.

(Yusuf, Nursiah Chalid & Yusbar, 2014) memberikan penjelasan bahwa tolok ukur keberhasilan daerah tidak cukup hanya diamati dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun masih terhadap faktor yang jauh lebih penting untuk melihat berhasil atau tidaknya proses pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yakni pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang ditujukan untuk masyarakat sehingga mereka mampu memilih pemberdayaan dalam rangka peningkatan kemampuan dasar yang mereka miliki. Ketika mereka memiliki kemampuan dasar yang semakin baik, mereka dapat dengan mudah untuk mengambil peran di berbagai bidang yang akan mendorong pembangunan di daerahnya.

Mengacu penjelasan di atas, judul yang diangkat adalah “ Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2021”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah ini disusun agar nantinya analisis yang telah dibuat tidak melebar dan menyulitkan pemahaman para pembaca. Permasalahan yang telah dibahas adalah Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2021 dengan variabel dependen indeks gini dan variabel independen yaitu Variable Laju Pertumbuhan PDRB per provinsi, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk, dan IPM selama 9 tahun yaitu 2013-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu penjelasan sebelumnya, rumusan masalah untuk analisis ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial UMP terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial IPM terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh secara simultan laju pertumbuhan PDRB, UMP, Jumlah Penduduk, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan juga rumusan masalah, tujuan dilakukannya analisis ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh secara parsial antara Laju Pertumbuhan PDRB dengan ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh parsial UMP terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh parsial Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh secara parsial IPM terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi di Indonesia.
5. Untuk menganalisis secara parsial ketimpangan pendapatan di setiap provinsi Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh simultan Laju Pertumbuhan PDRB, UMP, Jumlah Penduduk, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi di Indonesia.

1.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil analisis ini dapat dimanfaatkan oleh :

1. Mahasiswa / penulis

Memperluas pengetahuan baru dan juga menambah wawasan sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Pemerintah

Dapat digunakan untuk referensi, kajian, serta pertimbangan dalam penerapan kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penanggulangan permasalahan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia.

3. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan memberi informasi terkait penelitian dan sejenisnya pada masa yang akan datang.

4. Masyarakat

Diperuntukan sebagai sarana dan penambah wawasan tentang permasalahan ekonomi yang ada di daerahnya disertai dengan masalah ketimpangan pendapatan dan sebagai tambahan wawasan untuk pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas dan melakukan kajian atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dimana digunakan sebagai referensi disaat melakukan penelitian. Penelitian yang terdahulu dipakai sebagai bahan pembandingan kelebihan atau kekurangannya serta untuk menambah pendalaman pada penelitian ini.

(Ningrum, 2018) melakukan penelitian tentang “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015”. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan PDRB perkapita memberikan pengaruh yang positif pada masalah ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat, kemudian IPM berpengaruh negatif pada ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kota/Kabupaten Kalimantan Barat, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang memberikan pengaruh negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan.

(Andina, 2021) melakukan analisis tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2014-2020”. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Penelitian ini memanfaatkan variabel IPM, TPT, dan PDRB perkapita serta jumlah penduduk miskin. Dari hasil analisis ini diperoleh bahwa secara simultan untuk IPM, TPT, PDRB, dan jumlah penduduk miskin memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapat, dan juga secara parsial IPM dan PDRB berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan. Kemudian untuk TPT dan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

(Ematry, 2019) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015”. Analisis ini menerapkan metode regresi data panel. Variabel penelitian ini adalah IPM, TPT, dan UMP. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berpengaruh

pada ketimpangan pendapatan, sedangkan untuk TPT dan juga UMP tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Timur.

(Syafrizal Bakri, 2015) melakukan penelitian tentang “Analisis ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan kebijakan penanganannya”. Analisis ini menggunakan data panel menggunakan metode Ordinary Least Squared (OLS). Penelitian ini memperoleh hasil di mana pertumbuhan ekonomi berdampak positif signifikan pada ketimpangan pembangunan yang ada di Sumatera Barat, ketimpangan investasi mempengaruhi pembangunan di Sumatera Barat, ketimpangan investasi dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, tenaga kerja tidak berdampak signifikan pada fenomena ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, dan saldo dana ketimpangan berdampak signifikan positif sehingga mempengaruhi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

(Yuliani, 2018) melakukan analisis berjudul “Analisis ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan faktor-Faktor yang mempengaruhinya” . penelitian ini menggunakan variabel independen Pendidikan, Kemiskinan, PDRB, dan IPM sedangkan untuk variabel dependennya menggunakan Ketimpangan Pendapatan. Analisis ini memanfaatkan data sekunder dengan jenis data panel yang dianalisis menggunakan metode regresi data panel. Diperoleh hasil bahwa pendidikan tidak memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan. Variabel PDRB, IPM, kemiskinan, dan juga pendidikan menjelaskan bahwa variabel ketimpangan pendapatan 56% dan sisanya 44% dijelaskan dengan variabel lain diluar dari penelitian ini.

(Istikhroh, 2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018”. Analisis ini memanfaatkan metode regresi data panel. Sedangkan variabel yang digunakan adalah tingkat pendidikan, UMP, tingkat pengangguran, di mana secara bersamaan berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan. Secara individu, tingkat pendidikan dan UMP berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan,

sedangkan untuk tingkat pengangguran secara individu tidak berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan di DIY.

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

Keterangan (Nama, Judul, Metode Penelitian)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015. Ayu Puspa Ningrum (2018). Metode Penelitian Data Panel	PDRB perkapita memberikan pengaruh yang positif pada ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, IPM berpengaruh negatif signifikan, sedangkan TPT memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan pada ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat 2011-2015.	Menggunakan data time series dan cross section.	Variabel penelitian menggunakan TPT.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2020. Resta Dwi Andina, Jajang, Supriyanto (2021). Metode Penelitian Regresi Data Panel	Secara simultan TPT, IPM, PDRB memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan secara parsial PDRB dan IPM berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Untuk JPM dan TPT tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa 2014-2020.	Menggunakan variabel independen IPM dan variabel dependen indeks gini.	Variabel yang digunakan adalah TPT
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. Ermatry Hariani (2019). Metode Penelitian Regresi Data Panel	IPM mempunyai pengaruh pada ketimpangan pendapatan, tetap TPT dan UMK tidak memiliki pengaruh pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur	Menggunakan variabel independen IPM.	Variabel yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka.

<p>Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya. Bakri, Syafrizal, dan Hasdi Aimon (2015). Metode Penelitian Ordinary Least Squared (OLS)</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan pada ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat, pekerja tidak berdampak signifikan pada ketimpangan pembangunan yang ada di Sumatera Barat, dan saldo dana ketimpangan berdampak positif dan signifikan sehingga mempengaruhi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Data yang digunakan yaitu data JP</p>	<p>Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja, dan dana perimbangan.</p>
<p>Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Riri Yuliani (2018). Menggunakan analisis regresi data panel</p>	<p>Pendidikan tidak memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan di Bali, karena kesinambungan antara kemampuan dan juga pendidikan. Sedangkan variabel kemiskinan, PDRB, pendidikan, dan IPM menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendapatan sebesar 56% dan 44% dijelaskan dalam variabel yang lain di luar dari penelitian yang dilakukan</p>	<p>Menggunakan regresi data panel dan variable yang digunakan, PDRB dan IPM</p>	<p>Variabel independen, dalam penelitian ini menggunakan variabel pendidikan dan kemiskinan.</p>
<p>Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018. Istikharo, Whinarko Juli Prijanto, Rian Destingsih (2018). Metode penelitian menggunakan data regresi data panel</p>	<p>Tingkat pendidikan, UMP dan tingkat pengangguran secara bersamaan berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan. Kemudian untuk tingkat pengangguran berpengaruh signifikan, UMP berpengaruh signifikan dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan terhadap pendapatan</p>	<p>Variabel UMP dan variabel dependen indeks gini.</p>	<p>Variabel independen yang digunakan adalah tingkat pendidikan.</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai suatu perbedaan pada jumlah pendapatan dari sekelompok masyarakat di daerah yang sama (Anshari, dkk, 2018). Fenomena ketimpangan pendapatan di tiap-tiap daerah dipicu oleh keterbatasan dan juga pertumbuhan tiap daerah yang berbeda dan seringkali hanya terpusat di daerah tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan di tiap daerah. Kandungan SDA dan keadaan geografis pun turut serta menjadi pemicu fenomena ketimpangan sosial. Adanya perbedaan sumber daya juga memicu peningkatan dan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan daerah. Adanya perbedaan dari proses pembangunan ini dapat memicu timbulnya perbedaan daerah maju dan yang masih terbelakang.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Indikator yang dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran ketimpangan pendapatan adalah:

2.2.2 Gini Ratio

Gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan. Rumus yang dipakai untuk menghitung gini ratio:

$$GR = 1 - \sum_{i=100}^n f_{pi}(Fc_i + Fc_i)$$

GR = Gini Ratio

f_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 maka artinya pemerataannya sempurna, tetapi apabila bernilai 1 maka distribusi pengeluaran oleh masyarakat membaik begitupun dengan sebaliknya.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menjadi indikator yang dinilai penting untuk menganalisis ekonomi yang sedang berkembang di daerah dengan periode tertentu, di mana berdasarkan apa yang berlaku ataupun berdasarkan harga konstan. PDRB adalah nilai bersih dari jasa atau barang yang berasal dari aktivitas ekonomi suatu wilayah/daerah dengan periode tertentu, di mana PDRB mampu menampilkan gambaran kapabilitas daerah untuk mengelola sumber daya di daerah itu (Sasana, 2006).

PDRB dikelompokkan menjadi 2 macam, PDRB menurut harga konstan dan PDRB menurut harga yang berlaku. PDRB menurut harga konstan menggambarkan pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dikalkulasi dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai harga dasar. Sedangkan PDRB menurut harga berlaku memberikan gambaran mengenai pertambahan nilai barang yang dihitung dengan menggunakan harga di setiap tahun. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari PDRB, manfaat dari perhitungan PDRB yaitu :

1. Sebagai alat untuk mengetahui ataupun mengkaji bentuk dari susunan ekonomi. Hasil yang di tampak dari perhitungan PDRB dapat dimanfaatkan untuk mengetahui struktur ekonomi di suatu daerah, yang dapat menunjukan apakah daerah tersebut termasuk daerah industri, pertanian, ataupun jasa dan jumlah sumbangan yang diberikan oleh tiap sektor ekonomi.
2. Perhitungan PDRB dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan perekonomian pada suatu daerah dalam kurun waktu yang tertentu. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui catatan PDRB dari tahun ke tahun dengan harapan memperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi apabila ada kenaikan ataupun penurunan.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat ditandai dengan PDRB yang mengalami peningkatan yang dapat menampilkan adanya ketimpangan pendapatan. Kondisi ini dapat menjelaskan bahwa tingkat perilaku ekonomi dalam masyarakat mengalami peningkatan, yang mengakibatkan meningkatnya sektor ekonomi dan peningkatan pada sektor pendapatan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa semakin meningkatnya PDRB di suatu daerah maka tingkat ketimpangan di daerah tersebut rendah.

2.2.4 Upah Minimum Provinsi

UMP adalah standar atau tolok ukur minimum dalam pemberian upah untuk para tenaga kerja, pegawai, buruh, dan karyawan di suatu usaha atau lingkungan kerja yang dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun pengusaha. Upah minimum ini juga dapat digunakan untuk suatu kebijakan dalam rangka memastikan bahwa para tenaga kerja memperoleh upah layak yang nantinya dapat digunakan untuk mencegah kemiskinan.

Penetapan upah minimum dilakukan demi pencapaian kesejahteraan tenaga kerja serta mendapatkan penghasilan layak dengan tetap memperhatikan kemajuan usaha juga produktivitas (Izzaty, 2013). Pada tiap kota/kabupaten atau provinsi, dewan pengupahan akan memberikan usulan mengenai upah minimum dengan melakukan pertimbangan usul dari pemerintah, pekerja, serikat buruh, perguruan tinggi, dan juga pengusaha. UMP ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal 1 Januari. Penetapan upah minimum ini bertujuan untuk memberikan dorongan produktivitas tenaga kerja agar makin tinggi, demi imbal hasil kerja pekerja serta usaha untuk pengurangan ketidakmerataan pendapatan tinggi dan juga rendah.

2.2.5 Jumlah Penduduk

(Kuncora Achmad, 2014) menjelaskan bahwa dari jajaran ahli pembangunan, sudah ada consensus mengenai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di mana hal itu tidak cukup memberikan dampak buruk pada supply pangan saja, namun juga menghambat pengembangan cadangan devisa, tabungan, dan juga SDM. Ada tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang cenderung tinggi dapat membuat pembangunan semakin lambat, yakni:

1. Tingginya pertumbuhan penduduk akan diperlukan agar menciptakan tingginya konsumsi di masa depan. Sumber daya perkapita yang rendah akan memicu para penduduk mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat, yang nantinya akan mendapat giliran untuk pembuatan investasi dalam “kualitas manusia” yang makin sukar.
2. Negara-negara yang kebanyakan penduduknya senantiasa bergantung pada sektor pertanian, akan memicu tumbuhnya penduduk yang mengancam keseimbangan penduduk dan juga SDA yang langka. Hal ini disebabkan karena Sebagian dari pertumbuhan penduduk akan membuat perpindahan penduduk dari sektor pertanian dan pekerjaan modern menjadi melambat.
3. Cepatnya proses pertumbuhan penduduk akan semakin menyulitkan untuk melakukan perubahan yang betul-betul dibutuhkan demi melakukan peningkatan atas perubahan sosial dan ekonomi. Tingkat kelahiran yang semakin tinggi menjadi penyebab utama dari pertumbuhan kota yang melesat.

(Arsyad, 2004) menyebutkan bahwa ada tiga ciri utama yang menjadi suatu tanda perkembangan serta masalah yang timbul di ruang lingkup kependudukan Indonesia, yakni laju pertumbuhan penduduk yang dinilai cukup perlu dikontrol, sebaran penduduk yang dinilai tidak seimbang antar daerah, serta kualitas hidup penduduk yang cukup perlu ditingkatkan.

(Sukirno, 1997) menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk adalah suatu faktor utama yang mampu memberikan hambatan dan juga dorongan dalam suatu proses pembangunan. Dapat diartikan berperan sebagai faktor pendorong dikarenakan adanya kemungkinan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang muncul, kemudian munculnya fenomena pasar yang diperluas di mana terjadinya perluasan pasar ini ditentukan dua faktor yakni jumlah penduduk dan juga pendapatan penduduk. Dalam hal ini penduduk dapat dikatakan atau dikategorikan menjadi faktor penghambat pembangunan karena pada dasarnya akan menyimpang penurunan produktivitas dan memicu banyak orang yang tidak bekerja yang nantinya memicu ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

(Arsyad, 2004) menyebutkan bahwa ada tiga ciri utama yang menjadi suatu tanda perkembangan serta masalah yang timbul di ruang lingkup kependudukan

Indonesia, yakni laju pertumbuhan penduduk yang dinilai cukup perlu dikontrol, sebaran penduduk yang dinilai tidak seimbang antar daerah, serta kualitas hidup penduduk yang cukup perlu ditingkatkan.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu alur pembangunan yang memiliki tujuan untuk bisa mempunyai banyak opsi, terutama di bidang pendidikan dan juga pendapatan. Alat tolok ukur salah satunya adalah IPM (Mirza, 2012).

Dalam hal ini IPM dapat berperan menjadi tolok ukur suatu daerah ataupun negara entah itu masih memiliki keterbelakangan, sudah mulai berkembang, dan maju serta dapat digunakan untuk tolok ukur mengenai pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dihitung mengacu pada kemampuan daya beli masyarakat dan angka harapan hidup. Metode penghitungan IPM di Indonesia memakai metode yang sesuai dengan metode perhitungan yang dipakai UNDP. Di Indonesia sendiri IPM disusun atas 3 aspek, yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan dihitung dengan melalui rerata total tahun yang digunakan para penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang dijalani, dan juga angka melek huruf pada total penduduk untuk yang memiliki usia 15 tahun ke atas.

2. Angka harapan hidup

3. Standar layak hidup

Diukur dengan berdasarkan pengeluaran perkapita (ppp-Purchase Power Parity/paritas daya beli rupiah)

IPM adalah rerata dari 3 aspek tersebut dengan rumusnya :

$$IPM = (\text{angka harapan hidup} / \text{tingkat pendidikan} / \text{tingkat kehidupan layak})$$

Kondisi IPM diduga mempengaruhi tingginya jumlah tingkat ketimpangan. Tingkat IPM yang tinggi mengakibatkan jumlah pembangunan yang merata dan lebih baik karena dipengaruhi oleh kemampuan manusia yang baik juga begitupun dengan sebaliknya. Salah satu tolak ukur yang penting dalam kesuksesan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan

ekonomi yang memberikan gambaran mengenai suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilakukan.

2.2.7 Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.2.7.1 Hubungan Laju Pertumbuhan PDRB dengan Ketimpangan Pendapatan

PDRB merupakan nilai bersih antara jasa atau barang dari hasil aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu. (Sukamarga P, 2011) berpendapat mengenai definisi dari PDRB, yakni indikator pembangunan ekonomi di suatu daerah atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh pada permasalahan soal ketimpangan pada antar daerah. Ketimpangan pada pembagian pendapatan merupakan suatu fenomena yang lumrah terjadi terhadap ketimpangan pada suatu ekonomi yang sedang berkembang antar daerah di tempat tertentu yang nantinya dapat memicu ketimpangan tingkat pendapatan perkapita di daerah (Kuncoro & Mudrajad, 2004). Maka dari itu PDRB antar daerah jumlahnya pun berbeda-beda atau tidak sama antara daerah, besarnya PDRB tergantung dengan potensi sumber daya di daerahnya masing-masing. PDRB perkapita didapatkan dengan melakukan pembagian antara PDRB daerah dengan jumlah penduduk, maka dari itu tingkat PDRB di suatu daerah ataupun wilayah yang semakin tinggi menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut masih rendah. Pada penelitian oleh (Nuriansyah & Kusnaedi, 2011).

2.2.7.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan

UMP adalah upah minimum yang diberlakukan di provinsi dan berlaku untuk semua kota atau kabupaten. Kesejahteraan tenaga kerja dipicu oleh pendapatan para tenaga kerja yang meningkat, yang mana hal ini juga membuat kesejahteraan para pekerja juga semakin meningkat. Banyaknya jumlah upah atau pendapatan yang diperoleh oleh para pekerja dipengaruhi oleh keadaan lapangan pekerjaan. Perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diperoleh oleh setiap kelompok akan memicu fenomena ketimpangan pendapatan. Upah minimum yang naik hanya diperoleh para tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi dan tentunya dengan upah yang jauh lebih

tinggi sehingga tidak dapat dipungkiri mampu memicu tidak meratanya distribusi pendapatan tenaga kerja.

Di Indonesia sendiri, pemberian upah pada umumnya mengacu dari tiga fungsi upah, yakni cerminan imbalan atas hasil kerja para tenaga kerja, penjaminan hidup layak untuk tenaga kerja beserta keluarga, serta memberikan insentif untuk memicu produktivitas kerja. (Muhammad Anshari, 2018) menjelaskan dalam penelitiannya di mana upah minimum berpengaruh negatif dan mempunyai relasi signifikan akan terjadinya ketimpangan pendapatan.

2.2.7.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

(Sukirno S. , 1997) menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk adalah suatu faktor utama yang mampu memberikan hambatan dan juga dorongan dalam suatu proses pembangunan. Dapat diartikan berperan sebagai faktor pendorong dikarenakan adanya kemungkinan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang muncul, kemudian munculnya fenomena pasar yang diperluas di mana terjadinya perluasan pasar ini ditentukan dua faktor yakni jumlah penduduk dan juga pendapatan penduduk. Dalam hal ini penduduk dapat dikatakan atau dikategorikan menjadi faktor penghambat pembangunan karena pada dasarnya akan menyimpang penurunan produktivitas dan memicu banyak orang yang tidak bekerja yang nantinya memicu ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

(Arsyad, 2004) menyebutkan bahwa ada tiga ciri utama yang menjadi suatu tanda perkembangan serta masalah yang timbul di ruang lingkup kependudukan Indonesia, yakni laju pertumbuhan penduduk yang dinilai cukup perlu dikontrol, sebaran penduduk yang dinilai tidak seimbang antar daerah, serta kualitas hidup penduduk yang cukup perlu ditingkatkan.

Masalah jumlah penduduk ini dideteksi lewat pembangunan ekonom, karena pada dasarnya sedikit banyak jumlah penduduk di daerah tidak bisa dikatakan bahwa daerah itu memiliki jumlah penduduk yang berlebih (Matondang, 2018). Pada penelitian (Lestari, 2016) dijelaskan bahwa penduduk memberikan pengaruh yang positif signifikan pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Ini dipicu oleh

jumlah penduduk yang meningkat di suatu daerah namun tidak dibarengi dengan pengembangan kualitas dari SDM di mana yang akan memicu persaingan untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih sulit, yang berujung pada terjadinya pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang juga semakin tinggi (Arif, 2017).

2.2.7.5 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Becker (Tirmidzi, 2012) IPM memberikan pengaruh negatif pada ketimpangan, dimana Becker ini melakukan kajian lebih lanjut tentang peranan pendidikan formal dalam memberikan tunjangan pertumbuhan ekonomi dan mengatakan dimana pendidikan formal yang diperoleh makin tinggi, maka akan semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja. Fenomena ini selaras dengan teori *Human Capital*, dimana pendidikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi ketimpangan, dikarenakan pendidikan memiliki peran dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini memiliki anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditentukan dari produktivitas seseorang. Apabila tiap orang mempunyai penghasilan tinggi karena memiliki pendidikan yang juga tinggi, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi penduduk dapat dipicu dengan munculnya pertumbuhan ekonomi baik itu langsung atau tidak langsung di mana kana memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara yang perlu dilakukan pengujian melalui data melalui penelitian. Mengacu kepada penelitian sebelumnya dan landasan teori yang sudah diutarakan, sehingga diperoleh hipotesis penelitian:

1. Diduga Laju Pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh yang negatif pada Ketimpangan Pendapatan antar provinsi diseluruh Indonesia.
2. Diduga UMP memberikan pengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan antar provinsi di seluruh Indonesia.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif pada ketimpangan Pendapatan antar provinsi di seluruh Indonesia.
4. Diduga IPM memberikan pengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan pada antar provinsi di seluruh Indonesia.
5. Secara simultan besarnya Ketimpangan Pendapatan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDRB, UMP , Jumlah Penduduk, dan IPM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian dalam berbentuk angka sehingga memiliki arti tersendiri. Tujuan dari penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif adalah untuk menjelaskan mengenai pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, UMP, Jumlah Penduduk, dan IPM terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Pada penelitian ini mencakup 34 wilayah provinsi di Indonesia dalam jangka waktu 9 tahun dimulai dari 2013 hingga 2021 dengan data berjenis numeric. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan suatu kumpulan data yang telah siap untuk proses pengolahan (Widarjono A. , 2019). Data dalam analisis ini diperoleh dari BPS. Selanjutnya data diolah dengan regresi data panel, yang terdiri dari data time series dan cross section. Hasil dari analisis ini berjumlah 306 data dengan jumlah data time series pada periode 2013-2021 atau 9 tahun dan data cross section 34 provinsi di Indonesia.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penjelasan dari berbagai variabel yang dimanfaatkan di suatu analisis, di mana variabel tersebut dibagi dua, variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Ketimpangan pendapatan (Y) yaitu perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap individu, dengan satu dan lainnya dalam sebuah wilayah yang sama atau dalam wilayah yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks gini per provinsi mulai dari 2013 hingga 2021 yang diperoleh dari BPS.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen (X) adalah variabel yang tidak terikat dan memberikan pengaruh atas suatu perubahan variabel dependen. Variabel bebas antara lain yaitu:

1. Laju Pertumbuhan PDRB

PDRB (X1) adalah laju pertumbuhan output dan input dari hasil keseluruhan kegiatan ekonomi daerah dalam waktu yang tertentu. Pertumbuhan ekonomi per daerah atau per provinsi yang berada di Indonesia diolah menurut harga konstan, data diperoleh dari BPS dalam jangka waktu 2013-2021 dengan satuan per tahun dinyatakan dengan satuan juta rupiah.

2. UMP

Upah Minimum Regional (X2) merupakan standar upah bulanan minimal yang berupa upah pokok atau upah tanpa tunjangan termasuk tunjangan tetap di tiap daerah yang diberikan untuk tenaga kerja, buruh, atau karyawan oleh para penggiat industri di suatu lingkungan kerja atau usaha. Analisis ini menggunakan UMP di seluruh provinsi Indonesia dengan jangka waktu 2013-2021.

3. Jumlah Penduduk

Pada penelitian ini jumlah penduduk pada setiap provinsi yang ada di Indonesia (X3) merupakan data jumlah penduduk pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam jangka waktu 2013-2021.

4. IPM

Pada penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia (X4) dinyatakan dalam berbentuk angka. Analisis ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dengan jangka waktu 2013-2021.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan metode data panel dan instrumen yang digunakan untuk olah data yaitu dengan software Eviews 9.

3.3.1 Metode Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

Di mana: Y = Ketimpangan pendapatan
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Variabel Independen
 X1 = Laju Pertumbuhan PDRB
 X2 = TPT
 X3 = Jumlah Penduduk
 U_t = Variabel Pengganggu
 i = Cross section (Provinsi di seluruh Indonesia)
 t = Time series (Tahun Observasi)

Untuk estimasi model regresi data panel, adalah:

3.3.1.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model merupakan cara yang paling sederhana dalam mengestimasi data panel dengan cara mengkombinasikan data time series dan data cross section (Widarjono A. , 2018). Berdasarkan pada teori tersebut maka diperoleh persamaan CEM sebagai berikut ini :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.3.1.2 Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model merupakan model yang mempunyai perbedaan intersep dengan tiap subjeknya. Model ini memperkirakan dimana koefisien regresi tetap antar waktu dan daerah. Teknik estimasi data panel untuk model yang dimanfaatkan untuk

menjelaskan serta mengetahui perbedaan intersep ini memanfaatkan variabel dummy (Widarjono, 2018) . Dalam model ini maka persamaan Fixed Effect Model yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 d_{2i} \dots + e_{it}$$

Keterangan : D = Dummy

3.3.1.3 Random Effect Model (REM)

Random Effect Model atau General Least Square (GLS) dikarenakan perbedaan intersep maupun konstanta yang disebabkan residual yang kemudian memicu timbulnya perbedaan random entah itu perbedaan unit ataupun periode (Widarjono, 2018). Model persamaan REM yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + v_{it} v_{1i} = e_{it} + u_i$$

3.3.2 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penentuan model yang akan digunakan untuk analisis, maka perlu dilakukan langkah pengujian untuk mengetahui yang metode pendekatan estimasi butuhkan apakah sudah sesuai, dan mempunyai nilai regresi yang baik. Saat menentukan FEM atau CEM menggunakan Chow Test, diperoleh hasil regresi paling baik diantaranya. Untuk penentuan REM atau FEM digunakan pengujian Hausman, dimana hasil regresi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik di antara kedua pengujian yang dilakukan.

3.3.2.1 Chow Test

Chow test adalah model uji untuk penentuan model yang terbaik antara FEM ataupun REM bentuk hipotesis dari uji Chow test adalah:

H0 : Common Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Penolakan hipotesis didasarkan dengan cara melakukan perbandingan probabilitas F-statistik dengan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Apabila probabilitas F-statistik lebih besar dibandingkan nilai alpha, H0 diterima atau model yang terbaik adalah Common Effect Model. Tetapi jika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dibandingkan nilai

alpha, bisa dikatakan bahwa H_0 ditolak atau model terbaik adalah FEM (Nuryanto., 2018).

3.3.2.2 Hausman Test

Pengujian Hausman dilakukan setelah dilakukannya pengujian dengan uji Chow test dan menghasilkan penolakan terhadap H_0 dan H_1 diterima atau model Fixed Effect. Untuk pengujian Hausman model kembali diuji dengan melakukan perbandingan terhadap probabilitasnya dengan REM, dimana hipotesis yang diperoleh adalah :

H_0 : Random Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Pengambilan keputusan berpedoman terhadap perbandingan nilai probabilitas dan alpha ($\alpha=0,05$). Jika nilai probabilitas dari pengujian Hausman lebih besar dibanding alpha, H_0 diterima yang berarti metode regresi terbaik yang digunakan adalah REM tetapi jika nilai probabilitas Hausman lebih kecil dari pada alpha, H_1 diterima dan menolak H_0 sehingga metode regresi yang terbaik digunakan adalah REM.

3.3.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier atau bisa juga disebut uji LM digunakan untuk mengetahui model yang terbaik diantara Random Effect atau Common Effect. Pengujian LM ini dikembangkan Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan digunakan untuk melakukan pengujian signifikansi terhadap model Random Effect berdasarkan nilai residual pada metode OLS. Hipotesis pada uji LM ini adalah:

H_0 : Common Effect merupakan model terbaik.

H_1 : Random Effect merupakan model terbaik

H0 diterima atau Common Effect adalah model terbaik jika probabilitas dari Breusch Pagan Cross Section bernilai lebih besar terhadap tingkat signifikansi yang dipergunakan. Apabila H0 ditolak dan H1 diterima sehingga Random Effect adalah model yang terbaik, karena probabilitas dari Breusch Pagan Cross Section mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang dipakai.

3.4 Uji Statistik

Pengujian analisis statistik memiliki tujuan untuk agar mengetahui tingkat signifikansi dan kebaikan yang sesuai dengan variabel yang dianalisis. Untuk memberikan penjelasan tentang mengenai tingkat signifikansi dan kebaikan maka perlu dilakukan beberapa langkah pengujian, yakni sebagai berikut ini :

1. Uji signifikansi keseluruhan (uji F)

Menurut (Gujarati D. N., 2012) uji signifikansi secara menyeluruh adalah uji terhadap hipotesis penelitian yang berasal dari garis regresi yang dianalisis agar bisa mengetahui koefisien Y memiliki hubungan baik terhadap keseluruhan variabel terikat pada model terkait dengan asumsi apabila F hitung $>$ F kritis, bisa dibilang variabel terikat memiliki pengaruh secara menyeluruh pada variabel terikat. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H1= paling sedikit satu koefisien tidak sama

Hasil dari pengujian dapat dilihat dengan cara melakukan perbandingan terhadap nilai probabilitas f-statistik α ($\alpha=5\%=0,05$). Apabila probabilitas f-statistik $<$ α , maka menolak H0. Maka seluruh variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel independen.

2. Uji signifikansi koefisien regresi (uji t)

Untuk setiap pengujian variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel Y maka dilakukan uji t. Pada satu sisi uji t digunakan dalam penelitian ini dimana memberikan penjelasan bahwa pada setiap sisi dari uji t tidak memberikan pengaruh terhadap hasil uji. Hipotesisnya adalah:

A. Variabel Laju Pertumbuhan PDRB

H0: $\beta_1 < 0$, variabel laju pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel ketimpangan ekonomi.

H1: $\beta_1 > 0$, variabel laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi variabel ketimpangan ekonomi.

B. Variabel Upah Minimum Provinsi

H0: $\beta_1 > 0$, tidak adanya pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan ekonomi.

H1: $\beta_1 < 0$, terdapat pengaruh upah minimum provinsi terhadap ketimpangan ekonomi.

C. Variabel Jumlah Penduduk

H0: $\beta_1 < 0$, jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel ketimpangan ekonomi.

H1: $\beta_1 > 0$, tidak berpengaruh signifikan antara variabel jumlah penduduk terhadap ketimpangan ekonomi.

D. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

H0 : $\beta_1 < 0$, variabel indeks pertumbuhan manusia (IPM) memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel ketimpangan ekonomi.

H1 : $\beta_1 > 0$, tidak ditemui pengaruh yang signifikan antara variabel IPM pada variabel ketimpangan ekonomi.

Uji t dipergunakan untuk melakukan perbandingan t hitung dari variabel dengan t kritis. Jika t hitung $<$ t kritis maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. tetapi apabila nilai t hitung $>$ t kritis maka hasilnya adalah H0 akan tertolak. Variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen (Widjono, 2013).

3. Uji determinasi (R^2)

Menurut (Gujarati D. N., 2012) uji determinasi adalah cara untuk melakukan pengukuran proporsi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Uji determinasi ini di dalam pengukuran persentase model regresi yang dapat dijelaskan oleh variabel terikatnya. Nilai R^2 bernilai antara 0 dan 1, maka nilai R^2 yang semakin besar akan mengakibatkan variasi antara variabel bebas semakin besar juga yang menjelaskan variabel terikat. Akan tetapi jika R^2 nilainya dekat dengan 0 maka variasi variabel bebas yang memberikan penjelasan untuk variabel dependen akan semakin kecil



BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan yang juga berperan sebagai pendukung untuk penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui sebesar apa tingkat pengaruh variabel dependen (Gini) terhadap variabel independen (Laju pertumbuhan PDRB, upah minimum provinsi, jumlah penduduk, dan IPM) berdasarkan data tahun 2013-2021. Berikut adalah deskripsi nilai statistik *mean* atau rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta nilai standar deviasi.

Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian

	Indeks Gini	PDRB	UMP	JP	IPM
Mean	0.397670	4.520.627	2059054.	6.822.145	6.949.462
Median	0.360000	5.180.000	2017780.	3.712.900	6.974.000
Maximum	1.100.000	2.176.000	4416186.	49565.20	8.111.000
Minimum	0.256000	1.574.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Std. Dev.	0.612359	3.443.148	663815.2	10261.25	5.653.653
Skewness	1.721.374	-0.487945	0.205294	2.971.308	5.098.940
Kurtosis	2.985.458	1.094.768	3.474.928	1.096.206	6.109.953
Jarque-Bera	1117724.	8.094.894	4.976.008	1.246.202	43929.34
Probability	0.000000	0.000000	0.083076	0.000000	0.000000
Sum	1.204.940	1.369.750	6.24E+08	2067110.	21056.87
Sum Sq. Dev.	1.132.449	3.580.290	1.33E+14	3.18E+10	9.653.067
Observations	303	303	303	303	303

Sumber : Hasil Pengolahan E-views 9

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dalam bentuk *time series* dan *cross-section* sebagai bahan untuk dilakukan analisis dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel diantaranya:

1. Variabel Dependen

Untuk variabel terikat memanfaatkan data indeks gini 2013-2021 mengacu dari 34 provinsi di Indonesia.

2. Variabel Independen

- a. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan pada 34 provinsi yang berada di Indonesia dengan satuan persen (%) serta kurun waktu 9 tahun (2013-2021).
- b. Jumlah upah minimum provinsi berdasarkan pada 34 provinsi yang berada di Indonesia dengan satuan ribu rupiah serta kurun waktu 9 tahun (2013-2021).
- c. Jumlah penduduk berdasarkan pada 34 provinsi yang berada di Indonesia dengan satuan ribu jiwa serta kurun waktu 9 tahun (2013-2021).
- d. Indeks pembangunan manusia berdasarkan pada 34 provinsi yang berada di Indonesia dengan satuan persen (%) serta kurun waktu 9 tahun (2013-2021).

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode data panel. Untuk menentukan model terbaik maka dilakukan beberapa tahapan model pengujian, di antaranya adalah Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Kemudian dilanjutkan dengan uji Chow, dan uji Hausman untuk dapat mengetahui dan menentukan hasil yang terbaik.

4.3 Hasil Estimasi untuk Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect model

Tabel 4.2 Hasil estimasi model *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.304424	0.036610	8.315421	0.0000
PDRB	0.001578	0.000651	2.425516	0.0159
UMP	-1.01E-08	3.66E-09	-2.751518	0.0063
JP	8.16E-07	2.20E-07	3.707825	0.0002
IPM	0.000952	0.000537	1.771380	0.0775
R-squared	0.123207	Mean dependent var		0.362677
Adjusted R-squared	0.111438	S.D. dependent var		0.039216
S.E. of regression	0.036966	Akaike info criterion		-3.741263
Sum squared resid	0.407216	Schwarz criterion		-3.679980
Log likelihood	571.8013	Hannan-Quinn criter.		-3.716746
F-statistic	10.46871	Durbin-Watson stat		0.348299
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4.3 Hasil estimasi model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.188567	0.074205	2.541151	0.0116
PDRB	-0.000225	0.000434	-0.517580	0.6052
UMP	-1.98E-08	3.43E-09	-5.761024	0.0000
JP	2.87E-08	2.42E-07	0.118910	0.9054
IPM	0.002949	0.001119	2.634870	0.0089
R-squared	0.785595	Mean dependent var		0.356350
Adjusted R-squared	0.755995	S.D. dependent var		0.036170
S.E. of regression	0.017867	Akaike info criterion		-5.095962
Sum squared resid	0.085553	Schwarz criterion		-4.633556
Log likelihood	817.6822	Hannan-Quinn criter.		-4.911030
F-statistic	26.53982	Durbin-Watson stat		1.426030
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4.4 estimasi model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.079228	0.054695	1.448529	0.1485
PDRB	-9.59E-05	0.000430	-0.222796	0.8238
UMP	-2.29E-08	2.93E-09	-7.814566	0.0000
JP	4.44E-07	1.97E-07	2.248146	0.0253
IPM	0.004523	0.000826	5.474226	0.0000
Effects Specification				
	S.D.	Rho		
Cross-section random	0.020201			0.5611
Idiosyncratic random	0.017867			0.4389
Weighted Statistics				
R-squared	0.202297	Mean dependent var	0.100769	
Adjusted R-squared	0.191696	S.D. dependent var	0.020236	
S.E. of regression	0.018193	Sum squared resid	0.099632	
F-statistic	19.08332	Durbin-Watson stat	1.274968	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistic				
R-squared	0.388127	Mean dependent var	0.356350	
Sum squared resid	0.244153	Durbin-Watson stat	0.520279	

4.3.1 Pemilihan Model Terbaik

Setelah melakukan estimasi pada setiap model, dilakukan Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier, dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik.

Tabel 4.5 Hasil Uji *Chow*

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob	
Cross-section F	12.999121	(33,268)	0.0000	
Cross-section Chi-square	292.461585	33	0.0000	
Cross-section fixed effect test equation				
Variable	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob.
C	-0.010512	0.033459	-0.314169	0.7536
PDRB	0.000797	0.000610	1.307924	0.1919
UMP	-2.22E-08	2.94E-09	-7.545951	0.0000
JP	1.05E-06	1.40E-07	7.526818	0.0000
IPM	0.005644	0.000512	11.03155	0.0000
R-squared	0.442411	Mean dependent var		0.356350
Adjusted R-squared	0.435002	S.D. dependent var		0.036170
S.e. of regression	0.027188	Akaike info criterion		-4.355892
Sum squared resid	0.222492	Schwarz criterion		-4.295049
Log likelihood	671.4515	Hannan-Quinn criter.		-4.331559
F-statistic	59.70613	Durbin-Watson stat		0.629574
Prob(F-statistic)	0.000000			

H0 = Common Effect adalah model terbaik

H1 = Fixed Effect adalah model terbaik

Diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi-square adalah $0.0000 < 0.05$ dari hasil yang didapat pada pengujian di atas maka terbukti bahwa menolak H0. Artinya model terbaik yaitu model Fixed Effect.

Tabel 4.6 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob	
Cross-section random	15.103667	4	0.0045	
Cross-section random effects test comparison:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob
PDRB	-0.000225	-0.000096	0.000000	0.0229
UMP	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0870
JP	0.000000	0.000000	0.000000	0.0029
IPM	0.002949	0.004523	0.000001	0.0372
Cross-section random effects test equation				
VARIABLE	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	0.188567	0.074205	2.541151	0.0116
PDRB	-0.000225	0.000434	-0.517580	0.6052
UMP	-1.98E-08	3.43E-09	-5.761024	0.0000
JP	2.87E-08	2.42E-07	0.118910	0.9054
IPM	0.002949	0.001119	2.634870	0.0089
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.785595	Mean dependent var	0.356350	
Adjusted R-squared	0.755995	S.D. dependent var	0.036170	
S.E. of regression	0.017867	Akaike info criterion	-5.095962	
Sum squared resid	0.085553	Schwarz criterion	-4.633556	
Log likelihood	817.6822	Hannan-Quinn criter.	-4.911030	
F-statistic	26.53982	Durbin-Watson stat	1.426030	
Prob(F-statistic)	0.000000			

H0 = Random Effect

H1 = Fixed Effect

Diketahui nilai probabilitas Cross-section random senilai $0.0045 < 0.05$ melihat dari hasil uji diatas maka terbukti H_0 tertolak. Itu berarti model terbaiknya adalah model Fixed Effect.

4.3.2 Uji Statistik

Pada analisis ini memanfaatkan uji statistik yakni koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), serta uji signifikansi parameter individual (uji T)

4.3.2.1 Uji Kelayakan Model Signifikan F

Berdasarkan pada pengujian di Eviews didapatkan F-statistic senilai 26.53982 dan nilai Probabilitas (F-statistic) senilai 0.000000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka hasilnya adalah H_0 tertolak. Artinya model yang diestimasi layak digunakan dan terbukti bahwa laju pertumbuhan PDRB, UMP, jumlah penduduk, dan IPM berpengaruh signifikan secara simultan pada ketimpangan pendapatan di semua Provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2021.

4.3.2.2 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Berdasarkan pada pengujian di Eviews diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0.785595 atau 78,5595% yang menunjukkan variabel ketimpangan pendapatan diperjelas variabel laju pertumbuhan PDRB, UMP, Jumlah penduduk, dan IPM senilai 78,5595% kemudian untuk variabel sisanya dijelaskan di luar dari penelitian ini.

4.3.2.3 Uji Parsial (t-test)

1. Variabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Mengacu dari hasil estimasi Eviews diketahui t-statistic untuk variabel PDRB senilai -0.517580 dan nilai probabilitasnya adalah $0.6052 > 0.05$ sehingga hasilnya adalah gagal menerima H_0 . Artinya variabel laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

2. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)

Mengacu hasil estimasi Eviews diketahui nilai t statistik untuk variabel UMP adalah -5.761024 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.0000 < 0.05$ maka hasilnya

adalah gagal menerima H_0 . Yang berarti variabel UMP memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan, sedangkan untuk koefisien yang diperoleh sebesar $3.43E-09$. Artinya variabel UMP berpengaruh negatif signifikan pada ketimpangan pendapatan.

3. Variabel Jumlah Penduduk

Berdasarkan pada hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t statistik untuk variabel jumlah penduduk senilai 0.118910 dan nilai probabilitasnya $0.9054 > 0.05$ maka hasilnya adalah menolak H_0 . Artinya variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan.

4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Mengacu dari hasil estimasi Eviews, nilai t statistik untuk variabel indeks pertumbuhan manusia sebesar -0.881458 dan nilai probabilitasnya $0.0089 < 0,05$ maka gagal menolak H_0 . Yang berarti variabel IPM memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi Indonesia, kemudian koefisien yang diperoleh sebesar 0.002949. Artinya variabel IPM berpengaruh negatif signifikan pada ketimpangan pendapatan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh laju pertumbuhan PDRB dengan ketimpangan pendapatan

Hasil dari analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan dengan nilai probabilitasnya $0.6052 > 0.05$ maka artinya jika variabel laju pertumbuhan PDRB meningkat ataupun menurun 1% dapat dikatakan tidak akan memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini selaras dengan analisis yang juga dilakukan oleh (Sukma, 2021).

Mengacu pada hasil penelitian diatas, maka bisa diartikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum bisa menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan pada provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan peningkatan PDRB belum dapat dinikmati oleh semua kalangan, atau masih orang kaya saja yang dapat menikmati adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan

pertumbuhan PDRB tidak memberikan pengaruh pada ketimpangan yang terjadi pada provinsi di Indonesia.

4.4.2 Pengaruh UMP dengan ketimpangan Pendapatan

Mengacu dari hasil yang diperoleh diketahui UMP berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan. Nilai probabilitas dari UMP adalah $0.0000 < 0.05$ maka dari itu hasil ini sesuai dengan hipotesis dimana UMP memberikan pengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum tiap tahun mampu menaikkan pendapatan para tenaga kerja yang dinilai masih memiliki penghasilan rendah yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan analisis yang juga dilakukan oleh (Noviana, 2020) di mana dijelaskan upah minimum regional berpengaruh signifikan dan negatif pada ketimpangan pendapatan.

4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar $2.87E-08$ dan nilai probabilitas dari variabel jumlah penduduk senilai $0.9054 > 0.05$ maka dari itu hasilnya adalah menolak H_0 . Artinya variabel jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Mengacu pada hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mengalami peningkatan pendapatan karena jumlah penduduk yang meningkat masih belum dapat mempengaruhi secara signifikan untuk fenomena ketimpangan pendapatan antar provinsi yang ada di Indonesia. Hal seperti disebabkan penambahan penduduk belum mampu untuk menambah proporsi pendapatan. Dalam analisis ini sesuai dengan analisis yang dilakukan (Sukma, 2021). Pengaruh yang negatif dari meningkatnya jumlah penduduk yang meningkat dalam wilayah tertentu akan menyebabkan ketimpangan. Pada setiap provinsi yang ada di Indonesia terdapat adanya ketimpangan yang terjadi, yang menjadi masalah terjadinya ketimpangan tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi

oleh pendidikan dan keterampilan yang memadai. Maka kesimpulannya adalah jumlah penduduk tidak berpengaruh pada ketimpangan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia.

4.4.4 Pengaruh IPM dengan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa IPM memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi. Nilai probabilitas dari IPM adalah sebesar $0.0089 < 0,05$ maka artinya jika variabel indeks pembangunan manusia meningkat ataupun menurun 1% dapat dikatakan akan memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dimana IPM memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitiannya (Taharah, 2016) yang dimana IPM berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2009-2015. Tetapi hasil studi ini berbeda dengan penelitian dari (Holifah., 2017) yang dimana hasil dari IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten / kota di provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini sesuai dengan teori (Todaro, 2006) jumlah kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat didaerah itu sendiri. Tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia diberbagai daerah menyebabkan terdapat daerah yang lebih maju karena kualitas manusianya lebih baik dan ada daerah yang tidak maju karena kualitas manusianya rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan pada seluruh provinsi yang berada di Indonesia tahun 2013-2021. Maka dari itu ditarik kesimpulan berikut:

1. Laju Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan karena hasil regresi menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05. Yang berarti hasil regresi belum dapat membuktikan hubungan antara laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa jika laju pertumbuhan PDRB meningkat ataupun turun tidak akan memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan.
2. UMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi Indonesia. Ketika upah minimum meningkat, ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan.
3. Jumlah Penduduk (JP) tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan karena hasil regresi menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05. Yang berarti hasil regresi belum dapat membuktikan hubungan antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan. Maka dari itu hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang meningkat tidak memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan.

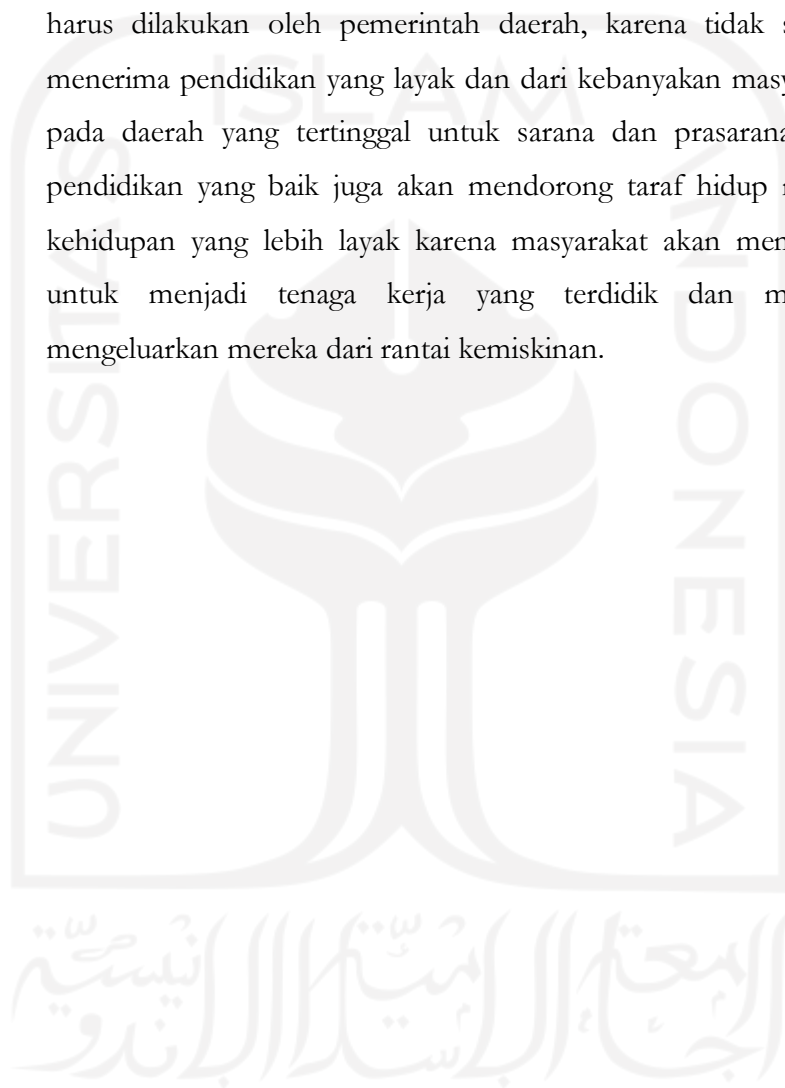
4. IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi IPM maka tingkat pendidikan dan kesehatan akan membaik dan kondisi masyarakat yang mempunyai kualitas, akan mendorong ke tingkat perekonomian yang lebih baik. Hal ini berarti tingkat perekonomian akan terdorong ke tingkat yang lebih tinggi sehingga ketimpangan pendapatan akan rendah dan lebih merata. Hal ini dapat terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, salah satunya pendidikan. Pendidikan formal yang semakin tinggi maka akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, jika jumlah pendapatan meningkat maka ketimpangan pendapatan akan menurun.

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk pemerintah agar segera mempunyai regulasi yang baru untuk mengatur pembangunan ekonomi agar bisa pemerataan ketimpangan yang ada pada setiap daerah. Hal ini perlu ditinjau ulang dan perlu adanya kajian lanjutan karena kesenjangan pendapatan menjadi masalah yang cukup serius. Sangat diharapkan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan daerah yang terpusat, tetapi diharapkan juga mampu sampai ke daerah-daerah terpencil.
2. Untuk pemerintah diharapkan mampu memberikan lebih banyak perhatian terhadap daerah yang masih kurang dari segi ekonomi atau pun tertinggal dari daerah yang lainnya dalam hal perekonomian. Perhatian yang khusus dari pemerintah diharapkan sesuai dengan keadaan yang ada pada wilayah tersebut. Contohnya adalah daerah yang mengalami kekurangan dalam segi ekonomi ini memiliki banyak sumber daya yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan daerah seperti pariwisata, tempat wisata ini dapat dimanfaatkan dan dibangun untuk menarik para wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal dengan cara diberikan perhatian khusus dari pemerintah. Perhatian khusus dari pemerintah tersebut dapat berupa pembangunan fasilitas dan akses jalan serta sarana dan prasarana untuk menunjang para wisatawan yang berkunjung ke

daerah tersebut yang nantinya akan meningkatkan perekonomian pada daerah tersebut.

3. Edukasi yang baik dan merata terhadap masyarakat juga perlu ditingkatkan pada setiap daerah-daerah. Memberikan perhatian khusus untuk pentingnya pendidikan setiap daerah menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena tidak semua daerah menerima pendidikan yang layak dan dari kebanyakan masyarakat berada pada daerah yang tertinggal untuk sarana dan prasarannya. Kualitas pendidikan yang baik juga akan mendorong taraf hidup masyarakat ke kehidupan yang lebih layak karena masyarakat akan mempunyai bekal untuk menjadi tenaga kerja yang terdidik dan mampu untuk mengeluarkan mereka dari rantai kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2017). *Analisis Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi di Sumatera 2007-2015*.
- Andina, R. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Arif, M. &. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). *Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, 323-328.
- Arsyad, & Lincoin. (2004). *Ekonomi Pembangunan* (Vol. 4). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Arsyad, L. (1999). In *Ekonomi Pembangunan* (p. 17).
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- ash shidiqie, J. s. (2021). *Materi 3 Aspek Hukum dan Menghitung Kebutuhan Investasi*. Retrieved from Google Classroom: <https://classroom.google.com/u/1/c/MjgzNTY5NzEyODky/m/MzEzODAyNTQ1NTkz/details>
- Ayu, K. a. (2016, April). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Pertambangan Nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. *Jurnal Ekonomi Uho*, 135-145.
- Bappeda. (2017). Artikel Pembangunan & Pertumbuhan Ekonomi.
- BPS. (2015). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mukomuko menurut pengeluaran tahun 2010-2014*. Mukomuko: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko.
- Brodjonegoro. (2018). media indonesia.
- Dani Henji Prastiwi, L. T. (2018).
- Ekwarso, H., Taryono, & Isyandi. (2016). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DUMAI.
- Ematry, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015”.

- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: Douglas Reiner.
- Gujarati, N. (2012). *Dasar Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi*.
- Hariadi, P., Arintoko, & Bawono, I. R. (2008). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan*.
- Hariani, E. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015*. The International Journal of Applied Business.
- Hasnan, S. (2014). *Studi Kelayakan Proyek Bisnis*.
- I.A.P. Putra. (2018). Analisis Pengaruh TPAK Wanita, PDRB Perkapita, IPM, dan Tingkat.
- Istikhroh, W. J. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 41-46.
- Izzaty, & S. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 131-145.
- Jaya, I. G., & N. S. (2009). KAJIAN ANALISIS REGRESI DENGAN DATA PANEL.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Kuncora Achmad, E. d. (2014). *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis*. Bandung.
- Kuncoro, & Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Jakarta*. Jakarta: Erlangga.

- Kustiana Ayu F.S, L. O. (2016, April). KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR PERTAMBANGAN NIKEL DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI. *Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1(1), April 2016*, 135-145.
- Lestari, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Mahesa Eka Raswita, N. P., & Utama, M. S. (2013). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN GIANYAR.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di desa palopat maria. 255-270.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development analysis Journal*.
- Muhammad Anshari, Z. A. (2018). ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN , UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA, 494–502.
- Mulyo, J. H. (2015). *DI KABUPATEN BOJONEGORO*, 115-120.
- Ningrum, A. P. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015.
- Noegroho, Y. S., & Soelistianingsih, L. (2008). *Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Jakarta: Wisma Makara.
- Noviana, S. N. (2020). *Pengaruh upah minimum Pengaruh upah minimum infrastruktur terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia*.
- Nuriansyah, F., & Kusnaedi. (2011). *Pengaruh PDRB Perkapita, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat Periode 1985-2009*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nuriansyah, F., & Kusnaedi. (2011). *Pengaruh PDRB Perkapita, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat Periode 1985-2009*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nuryanto. (2013). *EvIEWS untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: Unimma Press.

- Nuryanto., P. Z. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar*. Magelang: Unimma Press.
- P. H., & Syahputri, A. R. (2017). ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Pradipta, A. E. (2016). Analysis of Economic Growth and Revenue in the City District in East Borneo Province Year 2010-2016.
- Purwanti, S. D. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
- Rochaida, E. (2016). DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KELUARGA SEJAHTERA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal ekonomi Manajemen dan Akuntansi*.
- Rohani. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. In *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar*.
- Saputra, W. A. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*. semarang.
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. , 145-170*.
- Septiani, D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa YOgyakarta Tahun 2011-2017*.
- Sobana, D. H. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis*. CV PUSTAKA SETIA.
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia.
- Solihin. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Pertumbuhan, Pendidikan, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau pada tahun 2010-2016. In *Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi*. Yogyakarta.
- Statistik, B. P. (2021). *Garis Kemiskinan. Kemiskinan dan Ketimpangan*. Retrieved December 22, 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html%20Diakses%2025%20November%202021>

- Subri, & Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharlina, H. (2020). Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- Sukamaraga P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Sukamarga P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Sukirno. (2006). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (1997). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*.
- Sukirno, S. (2007). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukma, S. M. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019*.
- Sukma, S. M. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019*.
- Sukmarga. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di.
- Susilo, K. A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015*.
- Suyana Utama, M. (2008). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional*. Padang: Baduose Media.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Syafrizal Bakri, H. A. (2015). Analisis ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan kebijakan penanganannya.

- Syafrizal Bakri, H. A. (2015). Analisis ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan kebijakan penanganannya.
- Tirmidzi. (2012).
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2019). *Statistika Terapan Dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010.
- Yuliani, R. (2018). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*.
- Yusuf, Nursiah Chalid & Yusbar. (2014). *PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI RIAU*.
- Zainuddin. (2015). Analisis dampak Inflasi, PDRB dan Perkembangan Upah Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.

LAMPIRAN

Lampiran A : Data Penelitian

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (%)	PDRB (%)	UMP (juta)	JP (ribu jiwa)	IPM (%)
Aceh	2013	0.341	2.61	1550000	4811.2	68.30
Aceh	2014	0.325	1.55	1750000.00	4906.4	68.81
Aceh	2015	0.334	-0.73	1900000.00	5018.7	69.45
Aceh	2016	0.333	3.29	2118500.00	5094.5	70.54
Aceh	2017	0.329	4.18	2500000.00	5169.4	70.57
Aceh	2018	0.325	4.61	2700000.00	5243.4	71.19
Aceh	2019	0.342	4.14	2916810.00	5316.3	71.9
Aceh	2020	0.368	-0.37	3165031.00	5388.1	71.92
Aceh	2021	0.324	2.79	3165030.00	5333.7	72.58
Sumatra Utara	2013	0.354	6.07	1375000.00	1359.3	68.33
Sumatra Utara	2014	0.321	5.23	1505850.00	1376.5	68.87
Sumatra Utara	2015	0.336	5.10	1625000.00	1391.4	69.51
Sumatra Utara	2016	0.319	5.18	1811875.00	1436.8	70.52
Sumatra Utara	2017	0.315	5.12	1961354.00	1438.4	70.55
Sumatra Utara	2018	0.318	5.18	2132189.00	5411.8	71.36
Sumatra Utara	2019	0.346	5.22	2303403.00	5479.5	71.74
Sumatra Utara	2020	0.338	-1.07	2499423.00	5545.7	71.77
Sumatra Utara	2021	0.314	2.61	2499422.00	1496.2	72.39
Sumatra Barat	2013	0.363	6.08	1350000.00	5066.5	68.63
Sumatra Barat	2014	0.334	5.88	1490000.00	5318.8	69.36
Sumatra Barat	2015	0.342	5.53	1615000.00	5200.9	69.98
Sumatra Barat	2016	0.331	5.27	1800725.00	5272.5	70.73
Sumatra Barat	2017	0.318	5.30	1949284.00	5342.4	71.24
Sumatra Barat	2018	0.321	5.14	2119067.00	5411.8	71.73
Sumatra Barat	2019	0.31	5.01	2289220.00	5479.5	72.39
Sumatra Barat	2020	0.323	-1.62	2484041.00	5545.7	72.38
Sumatra Barat	2021	0.306	3.29	2484041.00	5580.2	72.65
Riau	2013	0.374	2.48	1400000.00	6033.3	69.91
Riau	2014	0.353	2.71	1700000.00	6184.4	70.33
Riau	2015	0.364	0.22	1878000.00	6356.7	70.84
Riau	2016	0.347	2.18	2095000.00	6478.4	71.20
Riau	2017	0.325	2.66	2534673.00	6598.7	71.77
Riau	2018	0.327	2.35	2464154.00	6717.6	72.43
Riau	2019	0.37	2.81	2662026.00	6835.1	73.2
Riau	2020	0.363	-1.13	2888564.00	6951.2	72.71

Riau	2021	0.326	3.36	2888563.00	6493.6	72.94
Jambi	2013	0.348	6.84	1300000.00	3286.1	67.76
Jambi	2014	0.329	7.36	1502300.00	3344.4	68.24
Jambi	2015	0.361	4.21	1710000.00	3403.9	68.86
Jambi	2016	0.349	4.37	1906650.00	3445.9	69.62
Jambi	2017	0.335	4.60	2358454.00	3478.1	69.99
Jambi	2018	0.334	4.69	2243719.00	3527.1	70.65
Jambi	2019	0.35	4.35	2423889.00	3566.2	71.26
Jambi	2020	0.351	-0.44	2630162.00	3604.2	71.29
Jambi	2021	0.321	3.66	2630161.00	3585.1	71.63
Sumatra Selatan	2013	0.383	5.31	1630000.00	7828.7	66.16
Sumatra Selatan	2014	0.399	4.79	1825000.00	7941.5	66.75
Sumatra Selatan	2015	0.36	4.42	1974346.00	8062.7	67.46
Sumatra Selatan	2016	0.348	5.04	2206000.00	8174.1	68.24
Sumatra Selatan	2017	0.361	5.51	2388000.00	8283.8	68.86
Sumatra Selatan	2018	0.358	6.01	2595995.00	8391.5	69.39
Sumatra Selatan	2019	0.35	5.69	2804453.00	8497.2	70.02
Sumatra Selatan	2020	0.358	-0.11	3043111.00	8600.8	70.01
Sumatra Selatan	2021	0.341	3.58	3043111.00	8550.9	70.24
Bengkulu	2013	0.386	6.07	1200000.00	1814.4	67.50
Bengkulu	2014	0.356	5.48	1350000.00	1844.7	68.06
Bengkulu	2015	0.376	5.13	1500000.00	1875.9	68.59
Bengkulu	2016	0.364	5.28	1605000.00	1900.7	69.32
Bengkulu	2017	0.334	4.98	1730000.00	1924.9	69.95
Bengkulu	2018	0.346	4.97	1888741.00	1948.6	70.64
Bengkulu	2019	0.35	4.94	2040407.00	1971.8	71.21
Bengkulu	2020	0.345	-0.02	2213604.00	1994.3	71.40
Bengkulu	2021	0.323	3.24	2213604.00	2032.9	71.64
Lampung	2013	0.356	5.77	1150000.00	7932.1	65.73
Lampung	2014	0.347	5.08	1399037.00	8026,2	66.42
Lampung	2015	0.376	5.13	1581000.00	8123,8	66.95
Lampung	2016	0.364	5.14	1763000.00	8210.3	67.65
Lampung	2017	0.334	5.16	1908447.00	8295.3	68.25
Lampung	2018	0.346	5.23	2074673.00	8377.7	69.02
Lampung	2019	0.35	5.26	2241270.00	8457.6	69.57
Lampung	2020	0.345	-1.67	2432002.00	8534.8	69.69
Lampung	2021	0.323	2.79	2431324.00	9081.8	69.90
KEP. Bangka Belitung	2013	0.313	5.20	1265000.00	1315.1	67.92
KEP. Bangka Belitung	2014	0.303	4.67	1640000.00	1343.8	68.27

KEP. Bangka Belitung	2015	0.283	4.08	2100000.00	1373.3	69.15
KEP. Bangka Belitung	2016	0.275	4.10	2341500.00	1393.1	69.55
KEP. Bangka Belitung	2017	0.282	4.47	2534673.00	1412.7	69.99
KEP. Bangka Belitung	2018	0.281	4.45	2755444.00	1432.1	70.67
KEP. Bangka Belitung	2019	0.28	3.32	2976706.00	1451.1	71.30
KEP. Bangka Belitung	2020	0.276	-2.30	3230024.00	1469.8	71.47
KEP. Bangka Belitung	2021	0.256	5.05	3230022.00	1473.2	71.69
KEP. Riau	2013	0.362	7.21	1365087.00	1861.4	73.02
KEP. Riau	2014	0.402	6.60	1665000.00	1917.2	73.40
KEP. Riau	2015	0.364	6.02	1954000.00	1982.8	73.75
KEP. Riau	2016	0.354	4.98	2178710.00	2045.3	73.99
KEP. Riau	2017	0.334	1.98	2358454.00	2109.4	74.45
KEP. Riau	2018	0.33	4.47	2563875.00	2174.8	74.84
KEP. Riau	2019	0.34	4.83	2769754.00	2241.6	75.48
KEP. Riau	2020	0.337	-3.80	3005460.00	2309.5	75.59
KEP. Riau	2021	0.343	3.43	3005383.00	2118.2	75.79
DKI.Jakarta	2013	0.433	6.07	2200000.00	9969.9	78.08
DKI.Jakarta	2014	0.431	5.91	2441000.00	1075.31	78.39
DKI.Jakarta	2015	0.431	5.91	2700000.00	10179.3	78.99
DKI.Jakarta	2016	0.411	5.87	3100000.00	10265.3	79.60
DKI.Jakarta	2017	0.413	6.20	3355750.00	10438.3	80.06
DKI.Jakarta	2018	0.394	6.11	3648036.00	10428.3	80.47
DKI.Jakarta	2019	0.39	5.82	3940973.00	10504.1	80.76
DKI.Jakarta	2020	0.399	-2.39	4276350.00	10576.4	80.77
DKI.Jakarta	2021	0.409	3.56	4416186.00	10609.7	81.11
Jawa Barat	2013	0.411	6.33	850000.00	45340.8	68.25
Jawa Barat	2014	0.413	5.09	1000000.00	46029.67	68.80
Jawa Barat	2015	0.415	5.05	1000000.00	46805.2	69.50
Jawa Barat	2016	0.422	5.66	2250000.00	47365.8	70.05
Jawa Barat	2017	0.403	5.33	1420624.00	47922.8	70.69
Jawa Barat	2018	0.407	5.65	1544361.00	48475.5	71.30
Jawa Barat	2019	0.41	5.02	1668373.00	49023.2	72.03
Jawa Barat	2020	0.412	-2.52	1810351.00	49565.2	72.09
Jawa Barat	2021	0.412	3.74	1810351.00	48782.4	72.45
Jawa Tengah	2013	0.387	5.11	830000.00	33264.3	68.02
Jawa Tengah	2014	0.376	5.27	910000.00	33522.66	68.78
Jawa Tengah	2015	0.328	5.47	910000.00	33728.9	69.49
Jawa Tengah	2016	0.366	5.25	190900.00	33946.4	69.98
Jawa Tengah	2017	0.365	5.26	1367000.00	34156.4	70.52

Jawa Tengah	2018	0.378	5.30	1486065.00	34358.5	71.12
Jawa Tengah	2019	0.38	5.36	1605396.00	34552.5	71.73
Jawa Tengah	2020	0.385	-2.65	1742015.00	34738.2	71.87
Jawa Tengah	2021	0.372	3.32	1798979.00	36742.5	72.16
DI Yogyakarta	2013	0.439	5.47	947114.00	3594.9	76.44
DI Yogyakarta	2014	0.419	5.17	988500.00	3637.2	76.81
DI Yogyakarta	2015	0.433	4.95	988500.00	3669.2	77.59
DI Yogyakarta	2016	0.42	5.05	145200.00	3718.5	78.38
DI Yogyakarta	2017	0.432	5.26	1337645.00	3768.2	78.89
DI Yogyakarta	2018	0.441	6.20	1454154.00	3818.3	79.53
DI Yogyakarta	2019	0.42	6.59	1570923.00	3868.6	79.99
DI Yogyakarta	2020	0.436	-2.68	1704608.00	3919.2	79.97
DI Yogyakarta	2021	0.441	5.53	1765000.00	3712.9	80.22
Jawa Timur	2013	0.364	6.08	866250.00	3863.2	67.55
Jawa Timur	2014	0.369	5.86	1000000.00	3861.2	68.14
Jawa Timur	2015	0.415	5.44	1000000.00	3874.3	68.95
Jawa Timur	2016	0.402	5.57	3045000.00	3941.4	69.74
Jawa Timur	2017	0.396	5.46	1388000.00	39287.3	70.27
Jawa Timur	2018	0.379	5.47	1508895.00	39521.9	70.77
Jawa Timur	2019	0.38	5.53	1630059.00	39744.8	71.50
Jawa Timur	2020	0.377	-2.33	1768777.00	39955.9	71.71
Jawa Timur	2021	0.374	3.57	1868777.00	40878.8	72.14
Banten	2013	0.399	6.67	1170000.00	11452.5	69.47
Banten	2014	0.395	5.51	1325000.00	11704.88	69.89
Banten	2015	0.401	5.45	1600000.00	11967.6	70.27
Banten	2016	0.394	5.28	1784000.00	12157.2	70.96
Banten	2017	0.382	5.75	1931180.00	12345.8	71.42
Banten	2018	0.385	5.77	2099385.00	12530.8	71.95
Banten	2019	0.36	5.26	2267990.00	12714.3	72.44
Banten	2020	0.36	-3.39	2460997.00	12895.3	72.45
Banten	2021	0.365	4.44	2446096.00	12061.5	72.72
Bali	2013	0.403	6.69	1181000.00	4056.3	72.09
Bali	2014	0.415	6.73	1542600.00	4104.9	72.48
Bali	2015	0.377	6.03	1621172.00	4148.4	73.27
Bali	2016	0.366	6.33	1807600.00	4202.4	73.65
Bali	2017	0.384	5.56	1956727.00	4256.3	74.30
Bali	2018	0.377	6.31	2127157.00	4309.2	74.77
Bali	2019	0.37	5.60	2297969.00	4362.4	75.38
Bali	2020	0.372	-9.33	2494000.00	4414.4	75.50

Bali	2021	0.378	-2.47	2493523.00	4362.7	75.69
Nusa Tenggara Barat	2013	0.364	5.16	1100000.00	4710.8	63.76
Nusa Tenggara Barat	2014	0.377	5.17	1210000.00	4773.8	64.31
Nusa Tenggara Barat	2015	0.368	21.76	1330000.00	4148.4	65.19
Nusa Tenggara Barat	2016	0.359	5.81	1482950.00	4202.4	65.81
Nusa Tenggara Barat	2017	0.371	0.09	1631245.00	4256.5	66.58
Nusa Tenggara Barat	2018	0.372	-4.50	1825000.00	4309.2	67.30
Nusa Tenggara Barat	2019	0.41	3.90	2012610.00	4362.4	68.14
Nusa Tenggara Barat	2020	0.403	-0.62	2183883.00	4414.4	68.25
Nusa Tenggara Barat	2021	0.381	2.30	2183883.00	4362.7	68.65
Nusa Tenggara Timur	2013	0.352	5.41	1010000.00	4954.1	61.68
Nusa Tenggara Timur	2014	0.355	5.05	1150000.00	5036.9	62.26
Nusa Tenggara Timur	2015	0.339	4.92	1250000.00	5126.1	62.67
Nusa Tenggara Timur	2016	0.336	5.12	1425000.00	5204.7	63.13
Nusa Tenggara Timur	2017	0.359	5.11	1650000.00	5282.8	63.73
Nusa Tenggara Timur	2018	0.351	5.11	1660000.00	5360.3	64.39
Nusa Tenggara Timur	2019	0.34	5.25	1795000.00	5437.2	65.23
Nusa Tenggara Timur	2020	0.334	-0.84	1950000.00	5513.4	65.19
Nusa Tenggara Timur	2021	0.346	2.51	1945902.00	5387.7	65.28
Kalimantan Barat	2013	0.396	6.05	1060000.00	4641.4	64.30
Kalimantan Barat	2014	0.391	5.03	1380000.00	4760.7	64.89
Kalimantan Barat	2015	0.334	4.88	1560000.00	4795.5	65.59
Kalimantan Barat	2016	0.341	5.20	1739400.00	4859.9	65.88
Kalimantan Barat	2017	0.327	5.17	1631245.00	4923.1	66.26
Kalimantan Barat	2018	0.339	5.07	2046900.00	4985.1	66.98
Kalimantan Barat	2019	0.34	5.09	2211500.00	5045.7	67.65
Kalimantan Barat	2020	0.335	-1.82	2399699.00	5104.9	67.66
Kalimantan Barat	2021	0.313	4.78	2399698.00	5470.8	67.90
Kalimantan Tengah	2013	0.350	7.37	1553127.00	2384.7	67.41
Kalimantan Tengah	2014	0.350	6.21	1723970.00	2439.6	67.77
Kalimantan Tengah	2015	0.326	7.01	1896367.00	2497.3	68.53
Kalimantan Tengah	2016	0.33	6.35	2057558.00	2536.3	69.13
Kalimantan Tengah	2017	0.343	6.73	1650000.00	2547.8	69.79
Kalimantan Tengah	2018	0.342	5.61	2421305.00	2612.6	70.42
Kalimantan Tengah	2019	0.37	6.12	2663435.00	2649.8	70.91
Kalimantan Tengah	2020	0.361	-1.41	2903145.00	2686.3	71.05
Kalimantan Tengah	2021	0.323	3.40	2903144.00	2702.2	71.25
Kalimantan Selatan	2013	0.359	5.33	1337500.00	3854.5	67.17
Kalimantan Selatan	2014	0.359	4.84	1620000.00	3922.7	67.63

Kalimantan Selatan	2015	0.353	3.82	1870000.00	3990.7	68.38
Kalimantan Selatan	2016	0.332	4.40	2085050.00	4049.5	69.05
Kalimantan Selatan	2017	0.347	5.28	1882900.00	4106.8	69.65
Kalimantan Selatan	2018	0.344	5.08	2454671.00	4162.4	70.17
Kalimantan Selatan	2019	0.35	4.09	2651782.00	4216.3	70.72
Kalimantan Selatan	2020	0.355	-1.82	2877449.00	4268.6	70.91
Kalimantan Selatan	2021	0.33	3.48	2877447.00	4122.6	71.28
Kalimantan Timur	2013	0.371	2.76	1752073.00	3870.8	73.21
Kalimantan Timur	2014	0.348	1.71	1886315.00	3385.1	73.82
Kalimantan Timur	2015	0.316	-1.20	2026126.00	3431.3	74.17
Kalimantan Timur	2016	0.315	-0.38	2161253.00	3479.6	74.59
Kalimantan Timur	2017	0.33	3.13	2339556.00	3527.1	75.12
Kalimantan Timur	2018	0.342	2.64	2543332.00	3573.8	75.83
Kalimantan Timur	2019	0.34	4.70	2747561.00	3619.7	76.61
Kalimantan Timur	2020	0.333	-2.87	2981379.00	3664.7	76.24
Kalimantan Timur	2021	0.334	2.48	2981378.00	3808.2	76.88
Kalimantan Utara	2013	0.413	4,43	1225000	3650.9	67.99
Kalimantan Utara	2014	0.336	8.18	2026126.00	584.54	68.64
Kalimantan Utara	2015	0.294	3.40	2026126.00	644.5	68.76
Kalimantan Utara	2016	0.3	3.55	2175340.00	657.3	69.20
Kalimantan Utara	2017	0.308	6.80	2358800.00	670.7	69.84
Kalimantan Utara	2018	0.303	5.36	2559903.00	682.8	70.56
Kalimantan Utara	2019	0.29	6.89	2765463.00	695.6	71.15
Kalimantan Utara	2020	0.289	-1.09	3000804.00	708.4	70.63
Kalimantan Utara	2021	0.292	3.98	3000803.00	713.6	71.19
Sulawesi Utara	2013	0.422	6.38	1550000.00	2360.4	69.49
Sulawesi Utara	2014	0.424	6.31	1900000.00	2386.6	69.96
Sulawesi Utara	2015	0.368	6.12	2150000.00	2409.7	70.39
Sulawesi Utara	2016	0.386	6.16	2400000.00	2432.2	71.05
Sulawesi Utara	2017	0.396	6.31	2598000.00	2453.7	71.66
Sulawesi Utara	2018	0.394	6.00	2824286.00	2474.4	72.20
Sulawesi Utara	2019	0.37	5.65	3051076.00	2494.1	72.99
Sulawesi Utara	2020	0.371	-0.99	3310723.00	2512.9	72.93
Sulawesi Utara	2021	0.365	4.16	3310723.00	2638.6	73.30
Sulawesi Tengah	2013	0.407	9.59	995000.00	2785.5	65.79
Sulawesi Tengah	2014	0.372	5.07	1250000.00	2831.2	66.43
Sulawesi Tengah	2015	0.374	15.50	1500000.00	2878.5	66.76
Sulawesi Tengah	2016	0.362	9.94	1670000.00	2919.8	67.47
Sulawesi Tengah	2017	0.355	7.10	1807775.00	2961.1	68.11

Sulawesi Tengah	2018	0.346	20.60	1965232.00	3001.9	68.88
Sulawesi Tengah	2019	0.34	8.83	2123040.00	3042.1	69.50
Sulawesi Tengah	2020	0.334	4.86	2303711.00	3081.7	69.55
Sulawesi Tengah	2021	0.316	11.70	2303710.00	3021.9	69.79
Sulawesi Selatan	2013	0.429	7.62	1440000.00	8342.8	67.92
Sulawesi Selatan	2014	0.425	7.54	1800000.00	8432.1	68.49
Sulawesi Selatan	2015	0.424	7.19	2000000.00	8520.8	69.15
Sulawesi Selatan	2016	0.426	7.42	2250000.00	8598.6	69.76
Sulawesi Selatan	2017	0.407	7.21	2500000.00	8674.4	70.34
Sulawesi Selatan	2018	0.397	7.04	2647767.00	8748.1	70.90
Sulawesi Selatan	2019	0.39	6.91	2860382.00	8819.5	71.66
Sulawesi Selatan	2020	0.384	-0.71	3103800.00	8888.8	71.93
Sulawesi Selatan	2021	0.382	4.65	3165000.00	9139.5	72.24
Sulawesi Tenggara	2013	0.426	7.50	1125207.00	2396.7	67.55
Sulawesi Tenggara	2014	0.409	6.26	1400000.00	2448.8	68.07
Sulawesi Tenggara	2015	0.399	6.88	1652000.00	2502.7	68.75
Sulawesi Tenggara	2016	0.402	6.51	1850000.00	2543.1	68.31
Sulawesi Tenggara	2017	0.394	6.76	2002625.00	2583.4	69.86
Sulawesi Tenggara	2018	0.409	6.40	2177052.00	2623.6	70.61
Sulawesi Tenggara	2019	0.41	6.50	2351870.00	2663.7	71.20
Sulawesi Tenggara	2020	0.404	-0.65	2552015.00	2703.5	71.45
Sulawesi Tenggara	2021	0.39	4.10	2552014.00	2659.2	71.66
Gorontalo	2013	0.437	7.67	1175000.00	1098.3	64.70
Gorontalo	2014	0.412	7.27	1325000.00	115.63	65.17
Gorontalo	2015	0.42	6.22	1600000.00	1133.6	65.86
Gorontalo	2016	0.419	6.52	1875000.00	1144.8	66.29
Gorontalo	2017	0.43	6.73	2030000.00	1155.6	67.01
Gorontalo	2018	0.403	6.49	2206813.00	1166.1	67.71
Gorontalo	2019	0.39	6.40	2384020.00	1176.4	68.49
Gorontalo	2020	0.393	-0.02	2788826.00	1186.3	68.68
Gorontalo	2021	0.408	2.41	2586900.00	1181.6	69.00
Sulawesi Barat	2013	0.349	6.93	1165000.00	1234.3	61.53
Sulawesi Barat	2014	0.352	8.86	1400000.00	158.09	62.24
Sulawesi Barat	2015	0.363	7.31	1655500.00	1281.7	62.96
Sulawesi Barat	2016	0.364	6.01	1864000.00	1301.4	63.60
Sulawesi Barat	2017	0.354	6.39	2017780.00	1320.9	64.30
Sulawesi Barat	2018	0.37	6.26	2193530.00	1340.1	65.10
Sulawesi Barat	2019	0.45	5.56	2381000.00	1359.2	65.72
Sulawesi Barat	2020	0.436	-2.40	2678863.00	1378.1	66.11

Sulawesi Barat	2021	0.356	2.56	2571328.00	1436.8	69.00
Maluku	2013	0.370	5.24	1275000.00	1628.4	66.09
Maluku	2014	0.351	6.64	1415000.00	1657.1	66.73
Maluku	2015	0.34	5.48	1650000.00	1691.3	67.05
Maluku	2016	0.348	5.73	1775000.00	1710.4	67.60
Maluku	2017	0.343	5.82	1925000.00	1730.2	68.19
Maluku	2018	0.343	5.91	2222220.00	1749.5	68.87
Maluku	2019	0.35	5.41	2400664.00	1768.5	69.45
Maluku	2020	0.295	-0.92	2604961.00	1787.1	69.49
Maluku	2021	0.314	3.04	2604960.00	1862.6	69.71
Maluku Utara	2013	0.318	6.36	1200622.00	1114.9	64.78
Maluku Utara	2014	0.325	5.49	1440746.00	1138.8	65.18
Maluku Utara	2015	0.28	6.10	1577617.00	1167.1	65.91
Maluku Utara	2016	0.286	5.77	1975000.00	1184.5	66.63
Maluku Utara	2017	0.317	7.67	1975000.00	1201.7	67.22
Maluku Utara	2018	0.328	7.86	2320803.00	1218.8	67.76
Maluku Utara	2019	0.31	6.25	2508091.00	1235.7	68.71
Maluku Utara	2020	0.297	5.35	2721530.00	1252.3	68.49
Maluku Utara	2021	0.32	16.40	2721530.00	1299.2	68.76
Papua Barat	2013	0.431	7.36	1720000.00	828.3	60.92
Papua Barat	2014	0.439	5.38	1870000.00	849.81	61.25
Papua Barat	2015	0.44	4.15	2015000.00	876.83	61.72
Papua Barat	2016	0.373	4.52	2237000.00	897.6	62.22
Papua Barat	2017	0.39	4.02	2416855.00	919.4	62.96
Papua Barat	2018	0.394	6.25	2667000.00	941.4	63.72
Papua Barat	2019	0.33	2.66	2934500.00	963.6	64.74
Papua Barat	2020	0.32	-0.76	3134600.00	986.8	65.05
Papua Barat	2021	0.38	-0.51	3134600.00	1299.2	65.26
Papua	2013	0.442	8.55	1710000.00	3032.5	56.22
Papua	2014	0.408	3.65	2040000.00	3091.5	56.45
Papua	2015	0.421	7.35	2193000.00	3153.8	57.23
Papua	2016	0.39	9.14	2435000.00	3202.4	58.04
Papua	2017	0.397	4.64	2663646.00	3252.3	59.24
Papua	2018	0.384	7.32	3000000.00	3300.2	60.06
Papua	2019	0.31	-15.74	3240900.00	3347.1	60.86
Papua	2020	0.296	2.39	3516700.00	393.1	60.48
Papua	2021	0.397	15.11	3516700.00	4355.4	60.66

Lampiran B : Common Effect Model

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/20/23 Time: 05:26
 Sample: 2013 2021
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 34
 Total panel (unbalanced) observations: 303

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.304424	0.036610	8.315421	0.0000
PDRB	0.001578	0.000651	2.425516	0.0159
UMP	-1.01E-08	3.66E-09	-2.751518	0.0063
JP	8.16E-07	2.20E-07	3.707825	0.0002
IPM	0.000952	0.000537	1.771380	0.0775
R-squared	0.123207	Mean dependent var		0.362677
Adjusted R-squared	0.111438	S.D. dependent var		0.039216
S.E. of regression	0.036966	Akaike info criterion		-3.741263
Sum squared resid	0.407216	Schwarz criterion		-3.679980
Log likelihood	571.8013	Hannan-Quinn criter.		-3.716746
F-statistic	10.46871	Durbin-Watson stat		0.348299
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran C : Fixed Effect Model

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/19/23 Time: 20:03
 Sample: 2013 2021
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.188567	0.074205	2.541151	0.0116
PDRB	-0.000225	0.000434	-0.517580	0.6052
UMP	-1.98E-08	3.43E-09	-5.761024	0.0000
JP	2.87E-08	2.42E-07	0.118910	0.9054
IPM	0.002949	0.001119	2.634870	0.0089

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.785595	Mean dependent var	0.356350
Adjusted R-squared	0.755995	S.D. dependent var	0.036170
S.E. of regression	0.017867	Akaike info criterion	-5.095962
Sum squared resid	0.085553	Schwarz criterion	-4.633556
Log likelihood	817.6822	Hannan-Quinn criter.	-4.911030
F-statistic	26.53982	Durbin-Watson stat	1.426030
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D : Random Effect Model

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/19/23 Time: 20:03
 Sample: 2013 2021
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 306
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.079228	0.054695	1.448529	0.1485
PDRB	-9.59E-05	0.000430	-0.222796	0.8238
UMP	-2.29E-08	2.93E-09	-7.814566	0.0000
JP	4.44E-07	1.97E-07	2.248146	0.0253
IPM	0.004523	0.000826	5.474226	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.020201	0.5611
Idiosyncratic random		0.017867	0.4389

Weighted Statistics			
R-squared	0.202297	Mean dependent var	0.100769
Adjusted R-squared	0.191696	S.D. dependent var	0.020236
S.E. of regression	0.018193	Sum squared resid	0.099632
F-statistic	19.08332	Durbin-Watson stat	1.274968
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.388127	Mean dependent var	0.356350
Sum squared resid	0.244153	Durbin-Watson stat	0.520279

Lampiran E : Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.999121	(33,268)	0.0000
Cross-section Chi-square	292.461585	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 01/19/23 Time: 20:06
Sample: 2013 2021
Periods included: 9
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.010512	0.033459	-0.314169	0.7536
PDRB	0.000797	0.000610	1.307924	0.1919
UMP	-2.22E-08	2.94E-09	-7.545951	0.0000
JP	1.05E-06	1.40E-07	7.526818	0.0000
IPM	0.005644	0.000512	11.03155	0.0000

R-squared	0.442411	Mean dependent var	0.356350
Adjusted R-squared	0.435002	S.D. dependent var	0.036170
S.E. of regression	0.027188	Akaike info criterion	-4.355892
Sum squared resid	0.222492	Schwarz criterion	-4.295049
Log likelihood	671.4515	Hannan-Quinn criter.	-4.331559
F-statistic	59.70613	Durbin-Watson stat	0.629574
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran F : Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.103667	4	0.0045

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	-0.000225	-0.000096	0.000000	0.0229
UMP	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0870
JP	0.000000	0.000000	0.000000	0.0029
IPM	0.002949	0.004523	0.000001	0.0372

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 01/19/23 Time: 20:07

Sample: 2013 2021

Periods included: 9

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 306

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.188567	0.074205	2.541151	0.0116
PDRB	-0.000225	0.000434	-0.517580	0.6052
UMP	-1.98E-08	3.43E-09	-5.761024	0.0000
JP	2.87E-08	2.42E-07	0.118910	0.9054
IPM	0.002949	0.001119	2.634870	0.0089

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.785595	Mean dependent var	0.356350
Adjusted R-squared	0.755995	S.D. dependent var	0.036170
S.E. of regression	0.017867	Akaike info criterion	-5.095962
Sum squared resid	0.085553	Schwarz criterion	-4.633556
Log likelihood	817.6822	Hannan-Quinn criter.	-4.911030

F-statistic	26.53982	Durbin-Watson stat	1.426030
Prob(F-statistic)	0.000000		



